

3.2.2.5 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran disertai dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah. Salah satu permasalahan fundamental dalam bidang lingkungan hidup adalah belum adanya dokumen perencanaan dan analisis tertulis yang mengakomodir potensi dan masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan yang mendukung keberlanjutan sektor lingkungan hidup	1	Belum optimalnya perencanaan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	1	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparaturnya terhadap peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup
			2	Belum adanya dokumen yang mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			3	Belum adanya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
	2	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	1	Penurunan kualitas udara karena pembakaran kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta kebakaran hutan dan lahan
			2	Penurunan kualitas air karena pencemaran limbah domestik, kondisi sanitasi tidak layak dan tingginya paparan beban pencemaran sungai

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
			3	Penurunan kualitas tutupan lahan karena deforestasi hutan/lahan, serta belum signifikannya reforestasi hutan/lahan dan kegiatan penanaman lainnya
			4	Terdapat tekanan demografi kepada kawasan konservasi yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa dan berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi
			5	Penerapan pola penanganan/pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan dan pengembangan circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah menggunakan metode 3R (reduce, reuse and recycle).
			6	Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
			7	Tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah
			8	Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai backbone ekonomi hdau belum terimplementasikan dengan baik di Papua Tengah. Konversi hutan mengganggu keseimbangan lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.6 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut pada akses pelayanan publik lainnya. Misalnya, akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang paling fundamental untuk memastikan

pengakuan hukum seorang individu oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan publik yang menjadi hak-nya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki dalam peningkatan cakupan penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Papua Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 3.12.

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Tengah meningkat signifikan, dari 37.32% pada tahun 2017 sampai 63.64% pada tahun 2020. Namun, kepemilikan akta lahir masih sangat rendah. Pada tahun 2021, masih ada 44.64% anak berusia 0-4 tahun yang belum memiliki akta lahir. Tentunya, hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan pencatatan sipil juga masih sangat buruk. Rasio pasangan yang berakte nikah pada tahun 2021 hanya ada 37.73%.

Adapun permasalahan yang disebutkan tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana prasarana kependudukan, seperti ketersediaan gedung perkantoran serta alat perekaman KTP. Selain itu, sumberdaya manusia atau kader di tingkat kampung sebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas. Adapun rumusan masalah pada bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3. 15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau semua masyarakat	1	Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	1	Belum optimalnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan akta catatan sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik
			2	Rendahnya penerbitan akta kelahiran bagi anak di setiap daerah
			3	Cakupan pendataan data terpilah OAP dan nonOAP belum 100%
			4	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan
	2	Terbatasnya sarana prasarana kependudukan	1	Sarana dan prasarana pendataan Dukcapil (Gedung perkantoran dan alat perekaman KTP) yang masih sangat terbatas dan menyebar tidak merata
			2	Terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga kerja atau kader untuk pencatatan dokumen kependudukan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.7 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meskipun dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di Papua Tengah, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kedepan. Lonjakan penduduk dapat mengakibatkan ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Permasalahan utama yang perlu menjadi pusat perhatian adalah rendahnya cakupan akseptor KB. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.16.

Pada umumnya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui upaya promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga berkualitas dengan usia kawin ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan melalui pola asuh tumbuh kebang balita dan remaja. Dalam hal ini, persepsi masyarakat mengenai program KB sangat penting, dan berdasarkan LKIP BKKBN Tahun 2020, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Program KB hanyalah upaya pembatasan jumlah anak dan pemusnahan etnik tertentu.

Selain itu dari segi pelaksanaan program, Papua Tengah masih belum optimal dalam menyediakan alat kontrasepsi bagi PUS. Terbatasnya petugas lapangan KB di tingkat kabupaten/kota juga memperparah pelaksanaan program KB. Selain itu, angka kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi. Adapun lengkapnya mengenai rumusan masalah pada bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana	1	Rendahnya akseptor KB aktif	1	Belum optimalnya penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS
			2	Rendahnya literasi fungsi dan keterkaitan KB
			3	Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan pemasangan alat kontrasepsi masih relatif terbatas
			4	Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (alkon) KB jangka Panjang
			5	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi karena lokasi kampung yang sulit terjangkau
			6	Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan kader KB
	2	Belum optimalnya upaya	1	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
		peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2	Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga, yaitu: 1. fungsi agama; 2. fungsi sosial budaya; 3. fungsi cinta dan kasih sayang; 4. fungsi perlindungan; 5. fungsi reproduksi; 6. fungsi sosialisasi dan pendidikan; 7. fungsi ekonomi; serta 8. fungsi pembinaan lingkungan
			3	Pernikahan usia anak
			4	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.8 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk mengembangkan potensi masyarakat, misalnya dalam sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian, pengelolaan institusi lokal masyarakat dalam suatu unit wilayah juga di pegang oleh bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini dipandang strategis sebagai unit pembangunan dalam paradigma baru membutuhkan upaya pemberdayaan. Khususnya di Papua Tengah, saat ini kebijakan Provinsi banyak mendorong terbentuknya pemberdayaan tersebut. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pembangunan kampung berbasis sumber daya kampung	1	Masih rendahnya penggunaan dana kampung untuk kebutuhan prioritas pembangunan kampung.	1	Masih lemahnya pemahaman masyarakat kampung dalam manajemen pengelolaan anggaran kampung.
			2	Belum maksimalnya pembinaan manajemen pengelolaan anggaran kepada setiap aparat kampung.
			3	Belum berjalannya fungsi evaluasi anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK).
			4	Belum terbentuk / belum dimanfaatkannya Badan Usaha Milik Kampung sebagai sumber

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				pendapatan kampung
			5	Pemenuhan aspirasi kebutuhan program kampung masih bersifat kekeluargaan belum sampai pada pemenuhan kebutuhan umum kampung
	2	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan kampung	1	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung (Bamuskam dan Baperkam).
			2	Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat kampung dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat
			3	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem administrasi kampung, termasuk Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua)
	3	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat kampung	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program prioritas kampung untuk kepentingan bersama.
			2	Belum tersedianya instrument kebijakan dan petunjuk pelaksanaan standar pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu serta pelaksanaan pemberdayaan OAP sesuai kewenangan Otsus di kampung
			3	Belum optimalnya pembinaan kader kampung dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung
	4	Belum optimalnya Pembangunan kampung	1	Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kewenangan Otonomii Khusus
			2	Belum optimalnya pelaksanaan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat kampung
			3	Penetapan target sasaran penerima manfaat dalam pembangunan kampung belum secara maksimal didukung ketersediaan data by name by address terpilah OAP dan non-OAP di tingkat kampung

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
			4	Cakupan implementasi program strategis pemberdayaan masyarakat dan kampung belum dilaksanakan oleh seluruh kampung dan kabupaten/kota

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.9 Urusan Bidang Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan ketidakoptimalan konektivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan dampak yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya konektivitas transportasi	1	Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan Pelayanan transportasi dalam pemenuhan kebutuhan transportasi	1	Kurang optimalnya pemanfaatan bandara perintis
			2	Kurang maksimalnya keberadaan titik terminal untuk mengangkut kendaraan umum dan penumpang
			3	Belum optimalnya fungsi fasilitas terminal karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan
			4	Rendahnya ketersediaan moda transportasi antar daerah
			5	Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara
			6	Biaya angkutan umum yang belum terstandar
			7	Masih terisolasinya beberapa wilayah distrik
	2	Lemahnya implementasi transportasi berwawasan lingkungan	1	Belum berjalannya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi seperti penurunan emisi gas buang kendaraan dan penurunan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
	3	Masih rendahnya Tingkat keselamatan dan keamanan perjalanan	1	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat (Lampu jalan, rambu-rambu)
	4	Belum optimalnya tatakelola urusan perhubungan	1	Kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara
			2	Proses perencanaan (studi pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama
			3	Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik Transportasi
			4	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.10 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; diseminasi informasi dan komunikasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Belum optimalnya Penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah	1	Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
				2	Masih sedikitnya SDM di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung yang menguasai keahlian pada bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan/management sistem E-Government termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				3	Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik, tata Kelola, sistem e-Government, serta sistem pendataan, termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				4	Belum diterapkannya pengamanan dan persandian terhadap sistem teknologi dan informasi pemerintah
				5	Belum adanya SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang persandian
				6	Belum optimalnya pelebagaan serta akselerasi cakupan penggunaan dan pendataan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung.
				7	Belum optimalnya pengadaan alat jurnalistik
2	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan	1	Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat
				2	Jaringan internet yang belum merata tersebar di seluruh wilayah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
	informatika			3	Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha sehingga menyisakan blank spot di wilayah non-komersial

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.11 Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan koperasi dan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.20.

Tabel 3. 20 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Kondisi perkembangan koperasi yang stagnan	1	Lemahnya tata kelola dan kelembagaan koperasi	1	Persentase koperasi aktif di Provinsi Papua Tengah masih rendah
				2	Banyak koperasi yang belum berbadan hukum
				3	Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas sehingga pengelolaan koperasi belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional
		2	Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran koperasi, serta kurang tanggapnya koperasi terhadap dinamika kebutuhan pasar	1	Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM
				2	Belum aktifnya peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan lokal

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
					(pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan)
2	Rendahnya kontribusi UMKM pada sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah	1	Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran UMKM	1	Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya
				2	Kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah
				4	Sulitnya kondisi geografis sehingga UMKM mengalami kesulitan mendistribusikan produk
				5	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
				6	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
				7	Masih rendahnya partisipasi Koperasi dalam aktifitas pertambangan rakyat
		2	Lemahnya kapasitas pembiayaan UMKM	1	Minimnya modal usaha sehingga UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak
				2	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menyediakan jasa pinjaman modal untuk UMKM belum dimanfaatkan secara optimal
				3	Mayoritas UMK merupakan UMK yang tidak berbadan usaha

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.12 Urusan Bidang Penanaman Modal

Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang penanaman modal di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Penanaman Modal di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Rendahnya kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan investor needs	1	Belum adanya kejelasan penyelesaian kasus antar investor dengan pemilik hak ulayat
			2	Belum tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah
			3	Belum optimalnya performa sistem logistik di Papua Tengah
			4	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan perizinan standar OSS
	2	Belum optimalnya kualitas penanaman modal	1	Belum optimalnya perkembangan pengusaha asli papua dalam kegiatan ekonomi
			2	Masih tingginya pelanggaran terhadap izin lokasi
			3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat izin usaha
			4	Belum efektifnya pelaporan pertanggung jawaban investor terhadap Pemerintah Daerah
	3	Lemahnya tata kelola penanaman modal	1	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM layanan perizinan
			2	Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN
			3	Belum optimalnya promosi investasi daerah
			4	Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan penanaman modal

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				antar pusat dan daerah
	4	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penanaman modal	1	Penundaan investasi oleh investor karena ketidakjelasan supply chain atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.13 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belum optimalnya penggalan potensi dan pengembangan kapasitas pemuda dan keolahragaan merupakan permasalahan yang ditemukan di Provinsi Papua Tengah. Telah tersedia fasilitas olah raga yang tersebar di seluruh kabupaten, namun belum dilakukannya pencarian dan pengembangan bakat olahragawan yang dapat dilatih untuk merepresentasikan Provinsi Papua Tengah dalam kompetisi-kompetisi olah raga. Selain itu, diperlukannya SDM/pelatih yang memiliki kompetensi di pendidikan keolahragaan untuk mengembangkan talenta calon-calon olahragawan. Berikut adalah tabel yang memetakan permasalahan di bidang kepemudaan dan olah raga.

Tabel 3. 22 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pengembangan daya saing pemuda berbasis pada unsur-unsur kebudayaan dan olahraga	1	Belum optimalnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga	1	Keterbatasan SDM pertandingan
			2	Banyak atlet yang mengalami kendala administrasi karena ada perbedaan data di akte dan kondisi fisiknya
			3	Kurangnya pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di bidang keolahragaan
			4	Prestasi dan daya saing keolahragaan yang belum maksimal
			5	Kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi
			6	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
	2	Belum optimalnya peran sosial pemuda	1	Munculnya orientasi berlebihan kepada kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kegiatan kepeloporan di bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga
			2	Budaya premanisme di kalangan pemuda
			3	Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan Narkotika
	3	Belum optimalnya peran pemuda sebagai penggerak ekonomi	1	Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda disebabkan karena (1) terbatasnya lapangan kerja; dan (2) belum sesuainya kompetensi dan kualifikasi pemuda dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia
			2	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.14 Urusan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Papua Tengah memiliki potensi yang besar, namun kondisi tersebut sekaligus menghadapkan Papua Tengah dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan kebudayaan.

Tabel 3. 23 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Kebudayaan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam Kehidupan masyarakat	1 Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1	Belum tersedianya ruang publik untuk pertunjukan seni dan budaya
		2	Promosi budaya yang belum memadai melalui festival dan event-event budaya di tingkat kabupaten dan Provinsi Papua Tengah.
		3	Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
		4	Belum optimalnya pembinaan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tua-tua adat kepada generasi muda, sebagai bentuk menjaga kelangsungan sejarah asal-usul, arsitektur rumah tradisional, pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal.
	2 Kurangnya pelestarian budaya asli Papua Tengah.	1	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya
		2	Belum dilestarikannya arsitektur rumah adat kaki seribu sebagai simbol arsitektur tradisional yang bernilai bagi pengembangan budaya dan pariwisata.
		3	Belum adanya roadmap dan catatan-catatan kajian Etnografi sebagai sarana pelestarian budaya suku OAP di Papua Tengah dimasa yang akan datang.
		4	Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
		5	Belum adanya museum etnografi sebagai tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya masyarakat

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
	3	Belum adanya pemetaan batas- batas ulayat adat ditingkat marga dan keret di kampung	1	Pemahaman batas-batas adat masih bersifat lisan dan belum ada yang tertulis atau dikaji dalam pemetaan, sehingga masih rawan konflik tanah adat antar kampung.
			2	Belum optimalnya pembinaan adat kepada generasi muda berkenan pemahaman tentang certa sejarah asal-usul dan batas-batas hak ulayat adat antar marga atau keret.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas: (1) urusan bidang perikanan; (2) urusan bidang pariwisata; (3) urusan bidang pertanian; (4) urusan bidang kehutanan; (5) urusan bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian.

3.2.3.1 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan bidang perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan, produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, beserta pengembangan SDM masyarakat bidang perikanan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perikanan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.24.

Tabel 3. 24 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perikanan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	1	Belum optimalnya produksi dan pemasaran sektor perikanan	1	Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
			2	Masih rendahnya teknologi perikanan Budidaya
			3	Masih rendahnya promosi hasil budidaya Perikanan
			4	Kurangnya pemahaman terkait teknik budidaya
			5	Belum optimalnya akses permodalan untuk peningkatan skala usaha budidaya perikanan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
			6	Belum efektifnya fungsi insfrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
	2	Lemahnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan	1	Belum efektifnya pengembangan industri pengolahan di bidang perikanan
	3	Belum optimalnya tata kelola sumber daya perikanan	1	Belum terdatanya nelayan budidaya dan nelayan tangkap
			2	Belum terbentuknya bina kelompok nelayan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.2 Urusan Bidang Pariwisata

Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pariwisata di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.25.

Tabel 3. 25 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pariwisata di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata	1	Belum tersedianya fasilitas akomodasi dan layanan makan dan minum untuk wisatawan (homestay, resort dan restaurant)
			2	Belum tersedianya sarana prasarana pariwisata, termasuk fasilitas penunjang atraksi wisata (gazebo, toilet, spot foto, pos jaga dan menara pandang)
			3	Belum optimalnya pengembangan ekowisata berbasis flora dan fauna endemik
			4	Belum optimalnya pengembangan dan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
			pengelolaan wisata budaya
		5	Belum optimalnya penguatan kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan
	2	1	Strategi komunikasi pemasaran belum terpadu sehingga branding pariwisata belum terpublikasi secara optimal
		2	Belum tersedianya layanan informasi pariwisata
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam mempromosikan citra Pariwisata
	3	1	Kapasitas SDM pariwisata masih terbatas
		2	Belum terlembaganya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
		3	Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor yang belum optimal dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.3 Urusan Bidang Pertanian

Urusan bidang pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perbaikan produktifitas komoditas pertanian, pemenuhan kebutuhan petani terhadap sarana prasarana pertanian, melakukan penyehatan hewan ternak, serta menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan ternak dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pertanian di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.26.

Tabel 3. 26 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Pertanian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					
1	Belum optimalnya kontribusi subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	1	Masih kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura
				2	Pengembangan varietas tanaman pangan unggulan lokal belum dilakukan dengan baik
				3	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan pertanian masyarakat
		2	Belum optimalnya Pemasaran komoditas tanaman pangan dan hortikultura	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
				3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping petani tidak memadai
				3	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok tani untuk menjadi wadah sharring knowledge petani
PERKEBUNAN					
2	Belum optimalnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi	1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas perkebunan	1	Masih kecilnya skala usaha perkebunan
				2	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah		
wilayah			3	Keterbatasan sumber bibit perkebunan yang berkualitas		
			4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan perkebunan masyarakat		
			2	Belum optimalnya Pemasaran komoditas perkebunan	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
			2		Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil perkebunan rakyat	
	3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar				
	3	Belum optimalnya pengembangan SDM perkebunan	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)		
			2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping perkebunan tidak memadai		
			3	Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik		
	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
	3	Belum optimalnya kontribusi subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan	1	Kurangnya distribusi bibit ternak
2					Kurang lengkapnya pendataan hewan ternak	
3					Belum adanya penyediaan sarana produksi ternak daerah (bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin ternak)	
2			Minimnya akses pelayanan kesehatan ternak	1	Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten	
				2	Belum optimalnya pemasaran komoditas peternakan	1
				2		Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
	3 Belum optimalnya pengembangan SDM peternakan		pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		1	Mayoritas tingkat pendidikan peternak adalah SD dan SMP sehingga dapat mempengaruhi kompetensi, kreativitas dan inovasi peternak dalam menghasilkan komoditas peternakan berkualitas dan berdaya saing
		2	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok ternak untuk menjadi wadah sharring knowledge petani
		3	Belum adanya pembinaan bagi kelompok ternak

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.4 Urusan Bidang Kehutanan

Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi dengan persentase hutan tertinggi di Indonesia berdasarkan data KLHK tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutan. Selain sebagai potensi yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan hutan juga memiliki tantangan yang tidak kecil. Berdasarkan data dan informasi sektor kehutanan beberapa tahun terakhir, dapat dirumsukan permasalahan yang dikelompokkan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Tabel 3. 27 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Kehutanan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang memastikan pengelolaan yang berkelanjutan di bidang kehutanan	1	Serapan emisi masih rendah dari sektor kehutanan dan lahan	1	Perubahan lahan yang tidak produktif menjadi produktif masih rendah
			2	Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan dan modal sosial masih lemah
	2	Belum optimalnya penjagaan dan pengawasan terhadap	1	Belum optimalnya pengawasan terhadap ekosistem hutan serta kawasan lindung
			2	Belum adanya regulasi khusus terkait pengelolaan hutan dan sumber daya

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
		hutan dan kawasan lindung		alam Hayati
	3	Nilai tambah hasil kehutanan masih rendah	1	Pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan masih rendah
			2	Dukungan SDM pendamping serta sarana dan prasarana masih terbatas
			3	Jaringan pemasaran hasil produksi masyarakat sangat terbatas
			4	Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.5 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah; pengelolaan minyak dan gas bumi; pelaksanaan inventarisasi geologi; serta akses penyediaan listrik secara optimal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat dalam Tabel 3.28.

Tabel 3. 28 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Rendahnya produktifitas sektor energi dan sumberdaya mineral	1	Belum maksimalnya peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antarpersonal maupun antarsektor	1	Belum efektifnya proses perizinan pertambangan (IUP)
				2	Belum optimalnya pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI)
				3	Kuantitas dan kualitas penelitian dan survey pelayanan geologi masih sangat kurang
				4	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan
				5	Rendahnya daya serap sektor pertambangan dalam menyerap produk-produk pertanian lokal
		2	Rendahnya akses masyarakat terhadap	1	Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan rumah tangga, industri dan perkantoran

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
	sumber daya energi listrik	2	Penyediaan sumber daya energi listrik pada kampung yang sangat terbatas dan tidak merata
		3	Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.6 Urusan Bidang Perdagangan

Urusan bidang perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan; terpenuhinya kebutuhan sarana distribusi perdagangan; mendorong stabilitas harga barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta menyelenggarakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.29.

Tabel 3. 29 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perdagangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum efektifnya penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan	1	Belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan
			2	Besarnya biaya transportasi untuk distribusi perdagangan
			3	Belum optimalnya sistem pengelola data dan informasi perdagangan
			4	Minimnya kualitas pasar rakyat dalam meningkatkan konsumsi produk domestik yang beredar di pasar rakyat
	2	Belum adanya standar mutu komoditas	1	Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
			2	Minimnya diversifikasi produk bernilai tambah berbasis berbasis SDA
			3	Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan
	3	Belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang	1	Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup
			2	Belum adanya jaminan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				yang tidak sehat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.7 Urusan Bidang Perindustrian

Urusan bidang perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perencanaan pembangunan industri; penerbitan izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang industri di Papua Tengah terdapat pada Tabel 3.30.

Tabel 3. 30 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perindustrian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Rendahnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur	1	Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu
			2	Belum optimalnya dukungan infrastruktur seperti jalan, listrik, air dan sarana pengelolaan limbah/ persampahan dalam pengembangan industri
			3	Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah
	2	Belum terwujudnya daya saing, kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan	1	Belum terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif
			2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas produksi dan industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
	3	Belum terwujudnya tata kelola perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1	Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri
			2	Lemahnya tingkat partisipasi pemegang izin usaha industri dalam menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang,

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
			1	realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4. Urusan Pemerintahan Penunjang

Urusan pemerintahan penunjang terdiri atas: (1) urusan bidang pemerintahan umum; (2) urusan bidang aparatur dan kepegawaian; (3) urusan bidang keuangan daerah; (4) urusan bidang perencanaan pembangunan daerah; serta (5) urusan bidang pengawasan pembangunan daerah.

3.2.4.1 Urusan Bidang Pemerintahan Umum

Berdasarkan pasal 25 UU No 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum mencakup: (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar atau UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; (4) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota; serta (6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan pemerintahan umum Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.31.

Tabel 3. 31 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pemerintahan Umum di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan publik Secara transparan dan	1	Belum optimalnya kordinasi kewenangan pemerintahan, kelembagaan dan tata laksana	1	Kuatnya prinsip money follow function dan money follow organization, serta belum efektifnya implementasi money follow programme
			2	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja dan antar-instansi serta dengan mitra

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
akuntabel		pemerintahan umum		strategis lainnya
			3	Belum optimalnya kordinasi kebijakan pembangunan antar yurisdiksi, distrik, kelurahan dan kampung
			4	Belum optimalnya kordinasi, perencanaan, implementasi serta monitoring evaluasipenyelenggaraan kebijakan otonomii khusus Papua
			5	Belum optimalnya kordinasi penyelenggaraan program-program Otonomii Khusus
			6	Belum efektifnya penataan kelembagaan daerah yang sesuai dengan kewenangan khusus yang dilaksanakan terkait dengan kebijakan Otsus Papua Tengah
			7	Belum optimalnya koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial serta afirmasi terhadap OAP
			8	Masih terdapat persoalan tanah ulayat yang belum selesai untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan
			9	Belum optimalnya pelaksanaan SPM di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota
			10	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah
			11	Rendahnya kewenangan Lembaga MRP dalam mengawal program-program otonomii khusus yang mengarah pada pemberdayaan perlindungan dan keberpihakan Masyarakat Asli Papua. Kewenangan hanya memberikan pertimbangan atau fungsi konsultatif
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Belum optimalnya pelayanan distrik, kelurahan dan kampung kepada masyarakat
			2	Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah
			3	Belum memadainya pelaporan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah
			4	Rendahnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			5	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan civil society
			6	Belum optimalnya penerapan nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi
			7	Publikasi dan diseminasi kebijakan Pemerintah Provinsi belum memadai

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.2 Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

Urusan bidang aparatur dan kepegawaian berkaitan dengan manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur memiliki nilai strategis dengan adanya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian di Pemerintahan Daerah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang aparatur dan kepegawaian di Papua Tengah terdapat pada Tabel 3.32.

Tabel 3. 32 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Belum optimalnya kompetensi, distribusi dan pelayanan ASN	1	Ketersediaan ASN di Provinsi Papua Tengah belum mencukupi kebutuhan daerah
			2	Rendahnya kualitas/ kompetensi SDM ASN sesuai tugas dan fungsi
			3	Rendahnya kemampuan pengelolaan data informasi berbasis komputer
			4	Masih kurangnya Penempatan ASN pada Jabatan tertentu berdasarkan kompetensi jabatan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
			5	Masih rendahnya jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Pimpinan
			6	Rendahnya jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklatsar CPNS
			7	Belum terbentuknya kebijakan kepegawaian yang disesuaikan dengan kebijakan Otsus Papua
			8	Rendahnya mentalitas ASN terkait disiplin dan kinerja
	2	Belum optimalnya kelembagaan dan tata laksana aparatur dan kepegawaian	1	Belum efektifnya sosialisasi sistem penilaian beban kerja pegawai
			2	Belum berkembangnya sistem reward untuk ASN berprestasi dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
			3	Belum adanya sistem database dan informasi ASN yang terintegrasi, komprehensif dan berbasis kinerja
	3	Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	1	Kurangnya sarana penunjang akses informasi dan komputer
			2	Model e-government masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi
			3	Belum adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.3 Urusan Bidang Keuangan Daerah

Urusan keuangan berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang keuangan di Papua Tengah terdapat pada Tabel 3.33.

Tabel 3. 33 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Keuangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah
			2	Belum akuratnya database pajak dan retribusi serta objek pendapatan daerah lainnya
			3	Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya
			4	Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Penyampaian LKPD tidak tepat waktu
			2	Penyusunan APBD yang tidak tepat waktu
			3	Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD
			4	Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah
			5	Prinsip value for money dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan
			6	Belum optimalnya penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah
	3	Belum optimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomii Khusus	1	Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otonomii Khusus
			2	Kurang optimalnya pelaporan pengelolaan dana otsus
			3	Belum tersedianya nomenklatur belanja dan program kegiatan khusus Otonomii Khusus
	4	Belum optimalnya kapasitas aparatur keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan	1	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi
			2	Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
		pelayanan publik		keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.4 Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan berkaitan dengan perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; perencanaan wilayah dan tata ruang; serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam implementasi urusan perencanaan, pembangunan daerah di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.34 berikut.

Tabel 3. 34 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan dan penataan ruang	1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil	1	Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan
			2	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
			3	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
			4	Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang diakibatkan
			5	Belum optimalnya kajian-kajian dan perencanaan khusus konstekstual Papua Tengah
	2	Belum optimalnya sinergi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1	Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan belum berjalan optimal
			2	Lemahnya tingkat pemahaman terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam melaksanakannya secara efektif dan efisien

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
	3 Belum optimalnya Penyelenggaraan Perencanaan Otonomii Khusus Khusus Papua	1	Cakupan pendataan OAP secara berkala dengan menggunakan SIO Papua yang terintegrasi belum 100%. Padahal, cakupan pendataan OAP berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan OTSUS bermanfaat bagi OAP.
		2	Terdapat OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya pembagian kewenangan urusan berdasarkan PP 106 Tahun 2021
		3	Belum tersedianya instrumen perencanaan khusus untuk pelaksanaan otonomii khusus di level Provinsi, kabupaten/kota dan juga Kampung. Perencanaan Otsus saat ini masih digabung dengan perencanaan umum daerah
		4	Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang OTSUS masih digabung dengan Musrenbang RKPD
	4 Terdapat permasalahan pengelolaan dan manajemen perencanaan	1	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
		2	Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu
		3	Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas OPD, termasuk hubungan perencanaan dengan provinsi dan pemerintah pusat
		4	Belum optimalnya penjangkaran aspirasi masyarakat di semua jenjang pemerintahan melalui mekanisme Musrenbang
		5	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
		6	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (ter-

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
			cascading)	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.5 Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Papua Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.35.

Tabel 3. 35 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya Sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dalam pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya	1	Belum optimalnya reviu terhadap dokumen Perencanaan, Anggaran dan dokumen lainnya (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, Renja dan RKA)
			2	Masih rendahnya Implementasi SPIP di Lingkup Pemerintah Daerah
			3	Masih rendahnya capaian penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
			4	Belum optimalnya pengawasan dan audit penyelenggaraan program program Otsus
			5	Belum terbentuknya wadah/majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Saberpungli dalam rangka penyelesaian kerugian daerah serta menunjang pelayanan Publik
	2	Belum optimalnya kapasitas dan integritas SDM tentang akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi dan rendahnya kesadaran pejabat untuk melaporkan harta kekayaan
			2	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, mark up harga, kurang volume pekerjaan dan pekerjaan tidak tepat waktu
			3	SDM APIP di Pemerintah Daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah
			(SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan solusi berkelanjutan. Seperti

- **Infrastuktur yang Terbatas**
Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan raya, transportasi, dan energi dapat menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas ke wilayah pedalaman. Hal ini menyulitkan distribusi barang, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
- **Ketidak Setaraan Pendidikan**
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi masalah di beberapa daerah Papua Tengah. Faktor geografis yang sulit diakses, kurangnya sarana pendidikan, dan tantangan keamanan dapat menghambat kesempatan pendidikan bagi masyarakat setempat.
- **Kesejahteraan dan Kemiskinan**
Meskipun Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, beberapa masyarakat di wilayah ini masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemisahan geografis dan kendala aksesibilitas mempersulit upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Masalah Kesehatan**
Layanan kesehatan di beberapa wilayah mungkin terbatas, dan akses ke fasilitas kesehatan seringkali sulit. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyebaran penyakit menular.
- **Ketegangan Sosial dan Konflik**
Beberapa daerah di Papua Tengah masih mengalami ketegangan sosial dan konflik, baik yang berkaitan dengan isu-isu pemekaran wilayah, hak asasi manusia, atau ketidaksetaraan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan wilayah.
- **Konservasi dan Pembangunan Ekonomi**

Tantangan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi dapat menjadi kompleks di Papua Tengah. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem alam dan berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan.

- Ketidak Setaraan Gender

Beberapa masyarakat di Papua Tengah masih menghadapi ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan rumah tangga. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah ini.

- Keterbatasan Akses Teknologi

Beberapa wilayah mungkin masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menghambat konektivitas dan akses informasi bagi masyarakat.

- Keterlibatan Masyarakat Lokal

Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan masih merupakan tantangan. Peningkatan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif.

3.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis memberikan gambaran tentang permasalahan pokok pembangunan maupun peluang yang merentang mulai konteks internasional, nasional, maupun regional di Tanah Papua. Berbagai isu tersebut membentuk lingkungan strategis bagi Provinsi Papua Tengah, yang kemudian sebagai dasar dalam perumusan isu strategis pembangunan Papua Tengah. Isu strategis sendiri diartikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang.

3.4.1 Isu Internasional

Pemerintah nasional dan sub nasional di berbagai negara memiliki kewajiban untuk merespon berbagai permasalahan internasional sebagai akibat dari adanya perkembangan zaman dan dinamika sosial politik di tingkat global. Berbagai isu internasional kerap muncul seiring kemajuan teknologi maupun dari skema kerja sama internasional, misalnya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah direspon oleh pemerintah Indonesia di tingkat nasional melalui Perpres No. 59 Tahun 2017. Selain itu, perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan, revolusi Industri 4.0 telah menciptakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi setiap warga negara dan lembaga pemerintah untuk menata kembali eksistensi mereka dengan mempercepat digitalisasi yang dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, aspek lingkungan juga turut menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Isu pemanasan global kerap menghantui berbagai belahan dunia di tengah maraknya pembangunan di berbagai negara. Adapun penjelasan secara lebih rinci mengenai isu-isu internasional yang sedang bergulir dapat dilihat pada bagian berikut.

3.4.1.1 *Sustainable Development Goals (SGDs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan buah kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang mulai diadopsi oleh berbagai negara sejak September 2015. Negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk memobilisasi negara-negara di dunia untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.

Sebagai sebuah tujuan global yang berorientasi lebih jauh untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan, SDGs mengajak seluruh negara dengan berbagai kekuatannya untuk mempromosikan kesejahteraan global sekaligus melindungi planet bumi dari berbagai ancaman keamanan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis mulai dari merumuskan sasaran yang tepat dan strategi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menangani berbagai permasalahan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta mengatasi perubahan iklim.

SDGs sebagai upaya pembangunan global memiliki 17 tujuan yang meliputi beberapa aspek pembangunan dan terdiri atas 4 pilar, yaitu: 1) Pembangunan Sosial; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan; dan 4) Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya, 17 tujuan pembangunan tersebut dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target tersebut merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, hingga level kabupaten/kota. Adapun 17 tujuan dari *SDGs* yang perlu dijadikan pijakan dalam melihat isu-isu strategis di level global adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan untuk semua, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
8. kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, terdapat 236 indikator *SDGs* yang merupakan kewenangan provinsi. Berdasarkan hasil indentifikasi awal terkait kesesuaian indikator *SDGs* dengan kondisi kewilayahan Papua Tengah, maka terdapat 224 (95%) Indikator *SDGs* yang sesuai dengan kondisi dan kewenangan pencapaian *SDGs* di Provinsi Papua Tengah. Guna memastikan pencapaian seluruh target indikator *SDGs* di Papua Tengah, maka diperlukan penyusunan dokumen RAD TPB/ *SDGs* yang selaras dengan perencanaan jangka Panjang Provinsi Papua Tengah. Hal ini harus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya pencapaian *SDGs* hingga tahun 2030.

3.4.1.2 Pemanasan Global

Di tengah era globalisasi ini, faktor kelestarian lingkungan perlu menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi dimana upaya pembangunan yang turut memperhatikan aspek lingkungan semakin mengalami penurunan. Jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat, maka ancaman global warming akan turut merusak kondisi lingkungan hidup.

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam dan dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir bahkan dapat menjadi faktor utama bencana alam lainnya. Oleh karena itu, antisipasi dalam bentuk kebijakan terhadap isu global warming menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah di berbagai dunia. Hal tersebut dapat dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Berbagai

bentuk upaya pembangunan harus memiliki strategi dan eksekusi yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan perlu dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan dampak dari global warming dapat diminimalisir. Sebagai salah satu upaya antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pengawasan peruntukan lahan yang ketat dalam pembangunan, khususnya yang melibatkan wilayah hutan. Hal ini dilakukan guna memastikan porsi lahan hijau di suatu wilayah tetap terjaga. Dengan adanya permasalahan pemanasan global, pentingnya suatu kebijakan yang mengatur wilayah Papua Tengah terutama lahan-lahan hijau yang merupakan paru-paru dunia.

3.4.1.3 Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan istilah untuk menggambarkan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur termasuk sistem cyber-fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, komputasi kognitif, dan artificial intelligence. Istilah ini bermula dari inisiatif untuk membuat industri manufaktur Jerman lebih kompetitif dan kemudian istilah ini diadopsi secara global. Tujuannya adalah untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan secara otonomi, memantau aset dan proses secara real-time, dan dunia yang lebih terintegrasi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia daring dan lini produksi di industri di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Perkembangan teknologi yang memunculkan revolusi industri 4.0 juga mendorong hadirnya perbaikan sektor publik. Berbagai pihak memprediksi bahwa keuntungan dari revolusi industri mampu mendisrupsi praktik-praktik tradisional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, warga negara memiliki akses yang lebih luas terhadap data publik dan mampu memproduksi serta menyebarkan isu-isu kepublikan kepada khalayak. Di waktu yang bersamaan, ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat seiring dengan tuntutan efisiensi dan efektifitas pelayanan, serta otomatisasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.

Namun demikian, hadirnya revolusi industri 4.0 juga memiliki tantangan yang setara dengan manfaat yang didapat. Salah satu hal yang paling kompleks adalah proses digitalisasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Proses ini sudah mulai dilakukan dan ditemukan dalam berbagai jenis layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan sektor lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan banyak ditemukan, terutama berkaitan dengan kesiapan SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Upaya perbaikan perlu terus dilakukan, mengingat manfaat yang akan didapatkan cukup besar. Upaya digitalisasi perlu dijadikan sebagai katalisator dalam upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah dengan syarat harus memperkuat bagian-bagian yang masih lemah.

Untuk memperkuat transformasi digital, kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia telah diarahkan pada dua sektor prioritas, yaitu pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Pertama, pelayanan publik telah melakukan transformasi digital sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pengembangan *E-Government* mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik. Kedua, transformasi digital di bidang ekonomi juga telah dilakukan sejak pemerintah melihat potensi besar ekonomi berbasis digital. Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Demikian pula, besarnya potensi ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah karena beberapa tantangan mendasar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa setidaknya ada lima tantangan transformasi digital di Indonesia dari perspektif investasi, yaitu: 1) cyber security atau keamanan data digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek; 3) kualitas sumber daya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi yang belum sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada konteks daerah-daerah di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik dan ekonomi perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain sebagai upaya untuk mengakselerasi, pelayanan di level daerah merupakan yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat. Di sektor pelayanan publik dan pemerintahan, pemerintah daerah berpeluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Namun demikian, tantangan pada sisi SDM dan aksesibilitas perlu diintervensi lebih serius. Meskipun terlihat sebagai konsep yang 'berat' dan belum begitu relevan dengan konteks wilayah di Provinsi Papua Tengah, beberapa aspek dari revolusi industri 4.0, seperti *E-Government* dan keamanan data menjadi sesuatu yang berguna untuk perbaikan layanan publik. Oleh karena itu, isu terkait revolusi industri 4.0 perlu menjadi satu bagian yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan di lingkup Provinsi Papua Tengah di tahun yang akan datang.

3.4.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Kependudukan

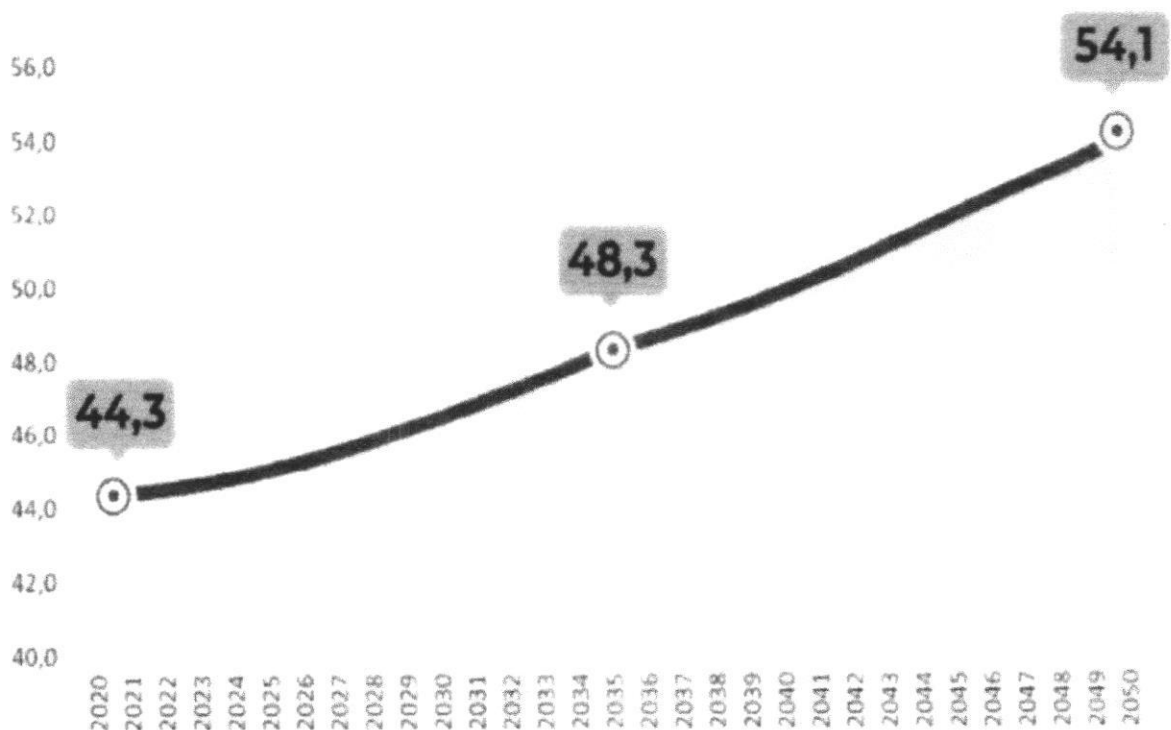
Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada tahun 2022, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata-rata tahun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki pasar yang besar, terutama untuk produk-produk

dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global dan dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Dengan strulfilr penduduk yang menguntungkan, di mana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi, yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran mereka terus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitasnya.

Gambar 3.4.2. 1 Rasio Ketergantungan Indonesia 2020-2050



Sumber: RPJPN 2025-2045

Produktivitas Rendah

Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tecermin dari Totol Factor Productiuitg (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomr Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan mencapai 5,3 persen pada lahun 2022.

Perubahan Iklim

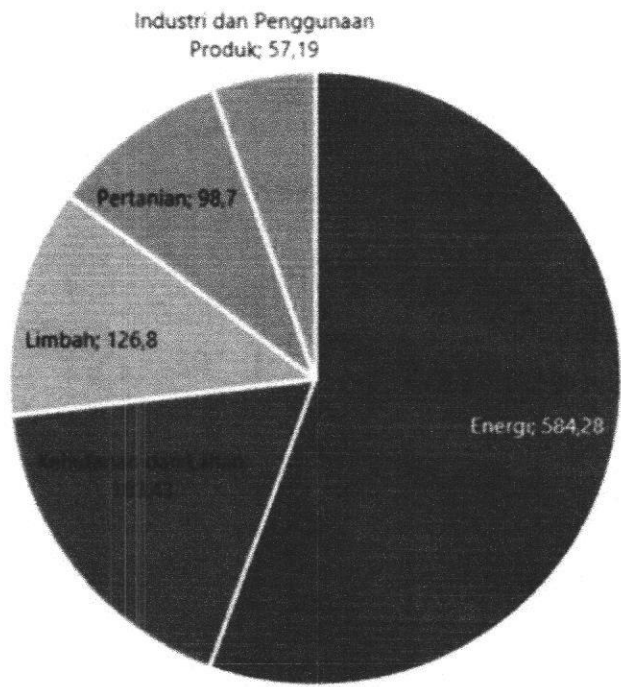
Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "kode merah bagi manusia." Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahun, 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 20231 yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oieh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar 0,7 - 0,9 cm/tahun.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang

wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024 yarrg diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

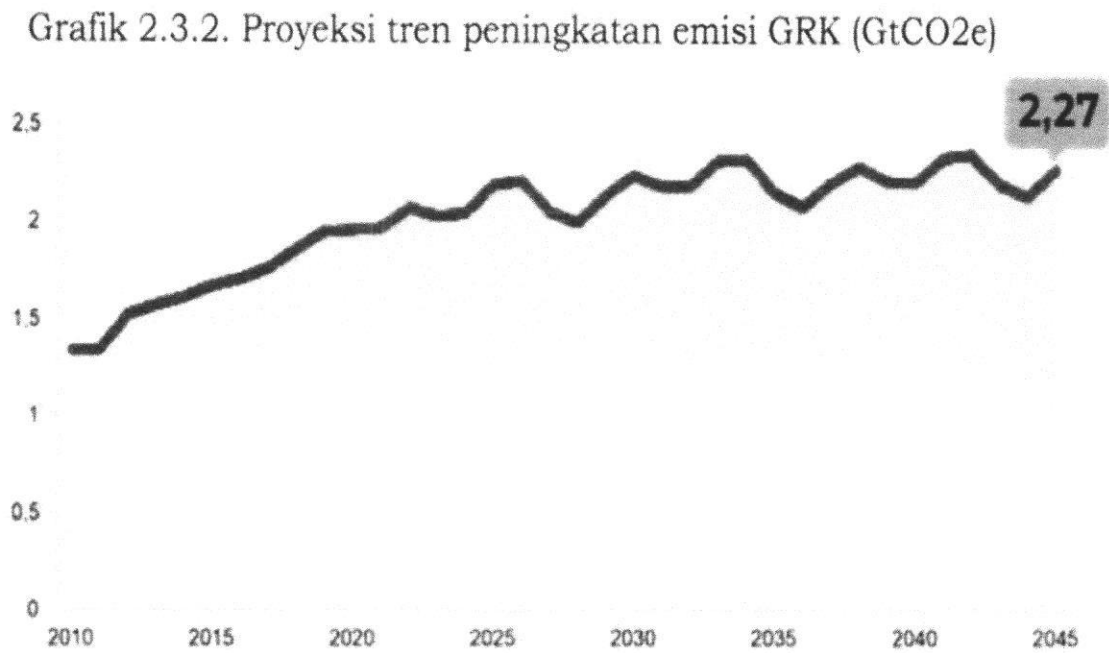
Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO₂e atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO₂e (Our World in Data based on the Global Carbon Project, 20221. Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila pembangunan tidak berubah. Pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap sumber daya aiam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan emisi GRK nasional akan terus meningkat hingga dua kali lipat mencapai 2,27 GtCO₂e di tahun 2045

Gambar 3.4.2. 2 Emisi Gas Rumah Kaca Nasional



Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar 3.4.2. 3 Proyeksi Tren Peningkatan Emisi GRK GtCO₂e Tahun 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi Resiko perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022 memberikan peringatan bahwa waktu untuk bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

Pemindahan Ibukota IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, menyongsong tatanan baru, cara kerja baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia ke depan. Undang-undang IKN disahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Pembangunan fisik IKN telah dimulai sejak tanggal 14 Maret 2022. Pemindahan ibu kota ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut super hub ekonomi IKN.

Pembangunan IKN menjadi miniatur penting dalam transformasi ekonomi. Menempatkan pembangunan dan pemindahan IKN sebagai core

program sejalan dengan menjadikan IKN sebagai superhub ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Jadi bukan hanya mengembangkan ekonomi Kalimantan Timur yang berbasis value creation tetapi juga mengimplementasikan strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui superhub tersebut yang akan meningkatkan perdagangan antara wilayah di Indonesia

3.4.3 Isu Pembangunan Papua

Isu pembangunan Papua merupakan isu dan persoalan pembangunan seluruh wilayah di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Tengah. Isu pembangunan Papua secara makro terkait kesejahteraan dan keberdayaan Orang Asli Papua, serta stabilitas wilayah. Isu Papua tidak hanya sebagai persoalan lokal, melainkan telah menjadi isu nasional. Pemerintah pusat, oleh karena itu telah merespon melalui berbagai kebijakan untuk penguatan otonomii khusus Papua dan percepatan pembangunan kesejahteraan. Kebijakan makro berupa revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Regulasi perubahan tersebut telah memiliki aturan turunan yang memuat detail terkait kewenangan otonomii khusus Papua hingga amanat penyusunan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Sebelum adanya kebijakan makro tersebut, telah dikeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Strategi pembangunan Papua yang termaktub di dalam Inpres tersebut, yaitu:

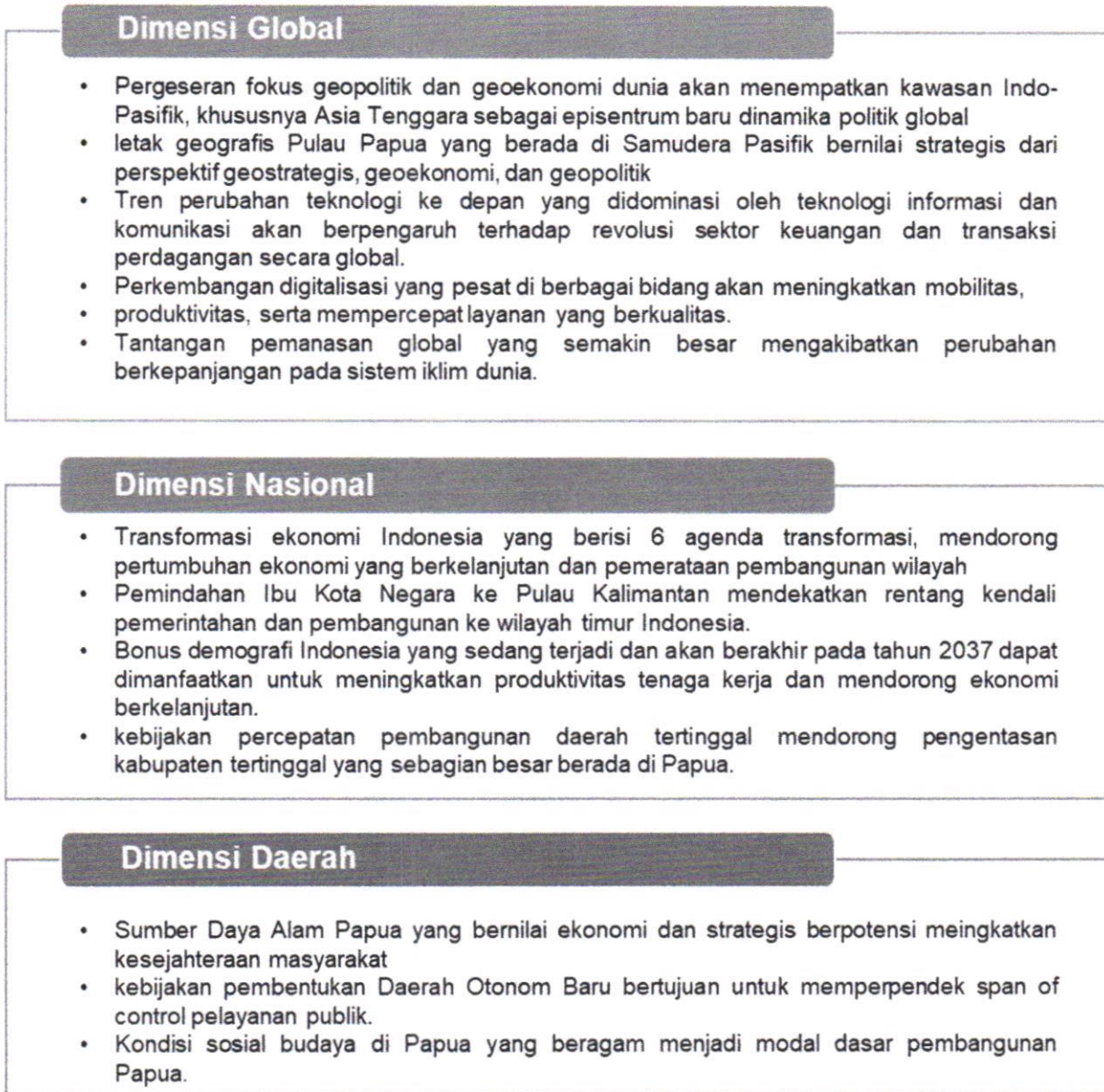
1. Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi.
2. Pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP).
3. Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

4. Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintahan daerah dan pelibatan peran serta masyarakat.
6. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua.
8. Peningkatan kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak.
9. Peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi
10. Peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua yang aman, stabil, dan damai.
11. Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Wilayah Pulau Papua.

Strategi tersebut telah komprehensif yang memandang Papua mulai dari level lokal, nasional, hingga internasional. Rumusan strategi juga menempatkan Orang Asli Papua sebagai subyek pembangunan sekaligus penerima manfaat yang besar dari pembangunan. Kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan Papua diperkuat dengan RIPPP yang berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pendanaan Papua dalam rangka otonomii khusus untuk kesejahteraan di Papua. RIPPP sendiri merupakan amanat dari perubahan undang-undang otonomii khusus, yang secara khusus dilandasi oleh Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

RIPPP merumuskan konteks lingkungan strategis yang mengerangkai mendesaknya percepatan pembangunan Papua. Konteks lingkungan strategis tersebut berada dalam dimensi global, nasional, dan daerah sebagai berikut:

Gambar 3.4.3. 1 Konteks Lingkungan Strategis Dalam Dimensi Global, Nasional, dan Daerah



Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 24 Tahun 2023

RIPPP memiliki Visi “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Visi tersebut akan dicapai melalui misi, sasaran, dan dimensi pembangunan. Selain itu, tidak kalah penting RIPPP juga merumuskan kondisi perlu sebagai prasyarat tercapainya sasaran pembangunan.

Tabel 3.36 Visi dan Misi RIPPP 2022-2041

Visi: Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera		
Misi	Sasaran	Dimensi Pembangunan
Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat.	Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.	• Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. • Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan. • Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.
Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas.	Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk.	• Fasilitas pendidikan yang berkualitas. • Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif. • Distribusi tenaga pendidikan yang merata. • Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

Visi: Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera		
Misi	Sasaran	Dimensi Pembangunan
Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif.	Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.	• Ekonomi masyarakat adat dan sumber daya lokal. • Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global. • Sumber daya alam yang berkelanjutan. • Ekonomi lokal. • Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kondisi Perlu: • Infrastruktur dasar dan konektivitas • Lingkungan hidup • Tata kelola pembangunan • Tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial		
Pengarusutamaan: • Gender • Sosial budaya • Transformasi digital • Resiliensi bencana dan perubahan iklim		

Sumber: Lampiran 1 Perpres No. 24 Tahun 2023

3.4.4 Isu Strategis KLHS Provinsi Papua Tengah

3.4.5 Isu Strategis Provinsi Papua Tengah

Selain isu-isu strategis internasional, nasional, dan wilayah Papua secara umum, Papua Tengah juga menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis di tingkat provinsi. Isu-isu ini terkait dengan pencapaian tujuan pembentukan daerah otonomii baru yakni untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP di ke-4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Isu-isu strategis di wilayah provinsi Papua Tengah muncul sehubungan dengan kondisi wilayah yang secara geografis berada di wilayah pedalaman dan terisolir, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan dan keamanan. Di sisi pemerintah daerah, terdapat peningkatan beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dengan berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang definitif, diharapkan akan terjadi optimalisasi pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Dalam melaksanakan otonomii daerah, Provinsi Papua Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah isu-isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah dalam melakukan pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh hampir semua wilayah di Papua secara umum dan secara khusus di Provinsi Papua Tengah dalam kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar

seperti bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gizi yang memadai.

Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan pokok misalnya adalah; belum adanya Perguruan Tinggi Negeri di Papua Tengah, cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal, dan Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah saat ini antara lain terjadi karena (1) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2) Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta (3) Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal. isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua Tengah seringkali masih dibayangi oleh adanya ancaman kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaan ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua Tengah sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangan dan peningkatan produksi komoditi pangan local dan membudayakan konsumsi pangan local perlu ditingkatkan di Papua Tengah untuk mencapai kedaulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua Tengah merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi stunting di Papua Tengah.

2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah masih rendah, jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini tentu saja berkontribusi pada rendahnya daya beli di masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu melakukan penguatan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada sumber daya lokal.

Ekonomi basis di Provinsi Papua Tengah adalah pertanian, perkebunan dan perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan ekonomi rumah tangga, terutama OAP. Perlu adanya peran pemerintah provinsi dalam mendukung, memfasilitasi dan memperkuat kegiatan ekonomi tersebut melalui faslitasi infrastruktur produksi dan pemasaran, pengembangan pelatihan dan pengembangan pusat-pusat pemasaran.

Provinsi Papua Tengah adalah provinsi dengan laju perkembangan kegiatan yang relatif pesat. Maka dari sisi SDM perlu dipersiapkan untuk memiliki keterampilan ekonomi non-basis, ekonomi kreatif mencakup keterampilan/kerajinan, kesenian/kebudayaan, dan digital adalah kegiatan ekonomi yang berkembang dan perlu dikuasai oleh sumber daya lokal. Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya keterampilan/ kerajinan peralatan pertanian, perkebunan dan perikanan, kuliner dan pakaian dan memenuhi kebutuhan cendera mata bagi turis baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam mengembangkan eknomi kreatif, pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota akan mendukung pengembangan pusat-pusat pelatihan dan pameran kerajinan/industri lokal.

3. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten

Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Disamping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan

harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

4. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah di Wilayah Papua Tengah

Pentingnya meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri, Tokoh Agama, masyarakat, dan komunitas adat guna memperkuat penanganan keamanan di Provinsi Papua Tengah. Komunikasi dan koordinasi penting dilakukan, agar penanganan keamanan berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya masalah keamanan jika tidak cegah secara dini maka akan mempengaruhi atau berdampak pada pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah.

BAB IV
VISI DAN MISI

4.1. RPJPN 2025-2045

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agendal, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045 (Visi Indonesia Emas 2045).

Gambar 4. 1 Kerangka Pikir RPJPN 2025-2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok transformasi.

4.1.1 Visi dan Misi Abadi Negara

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Visi tersebut didukung oleh empat misi abadi yang merupakan tujuan bangsa Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4.1.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Gambar 4. 2 Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Negara Nusantara merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Bersatu

Pada tahun 2045, Indonesia yang Bersatu adalah Indonesia sebagai negara yang Kuat Berdasarkan Pancasila dan Semangat Bhineka Tunggal Ika untuk membangun Indonesia Emas.

Berdaulat

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Maju

Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berkelanjutan

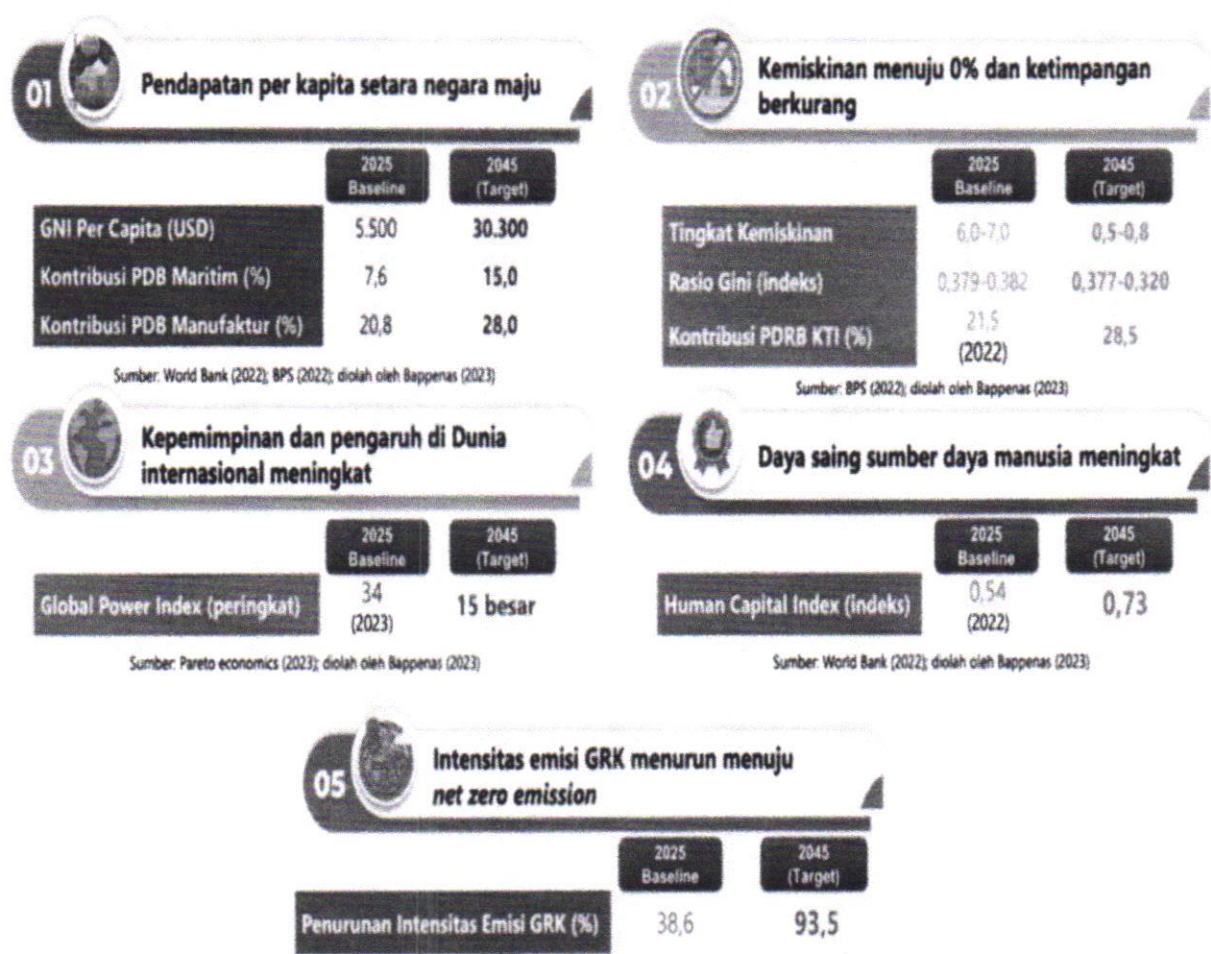
Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan dan inovasi.

4.1.1.2 Sasaran Utama

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas Emisi GRK menuju net zero emission.

Gambar 4. 3 Sasaran Visi Utama Indonesia Emas 2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,377-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada tahun 2045.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

4.1.2 Misi

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata

dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan.

Gambar 4. 4 Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.

Gambar 4. 5 17 Arah (Tujuan) Pembangunan 2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

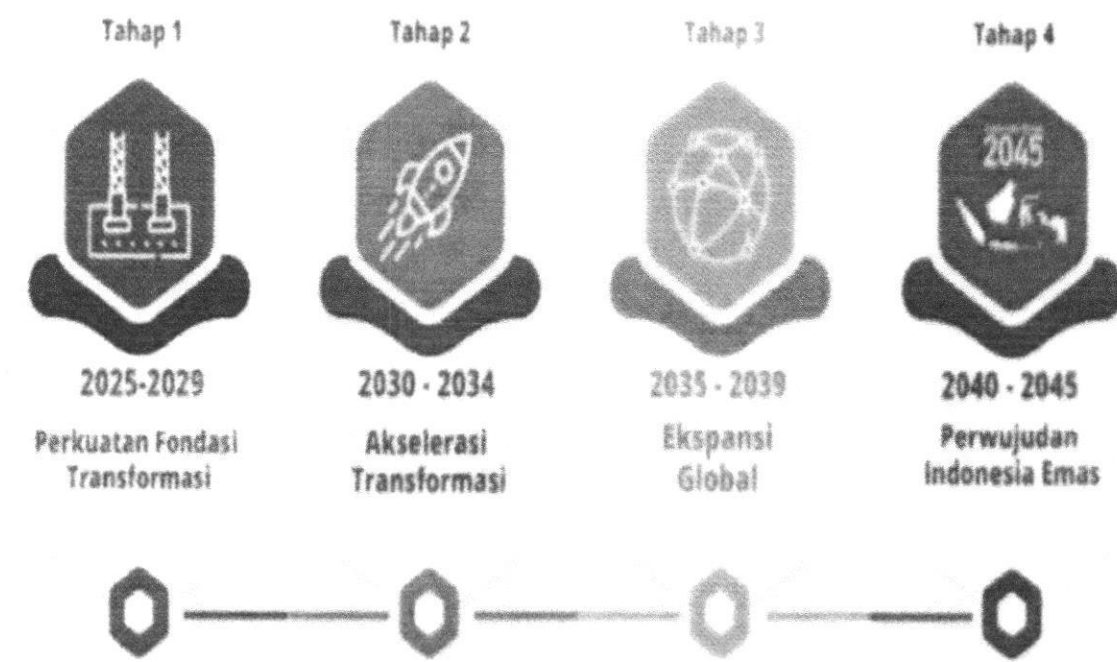
Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia secara umum telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Kesenambungan nilai-nilai tersebut harus dipastikan selalu terarah pada kepentingan nasional.

4.1.2.1 Pentahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Gambar 4. 6 Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Tabel 4.1 Pentahapan Pembangunan Indonesia

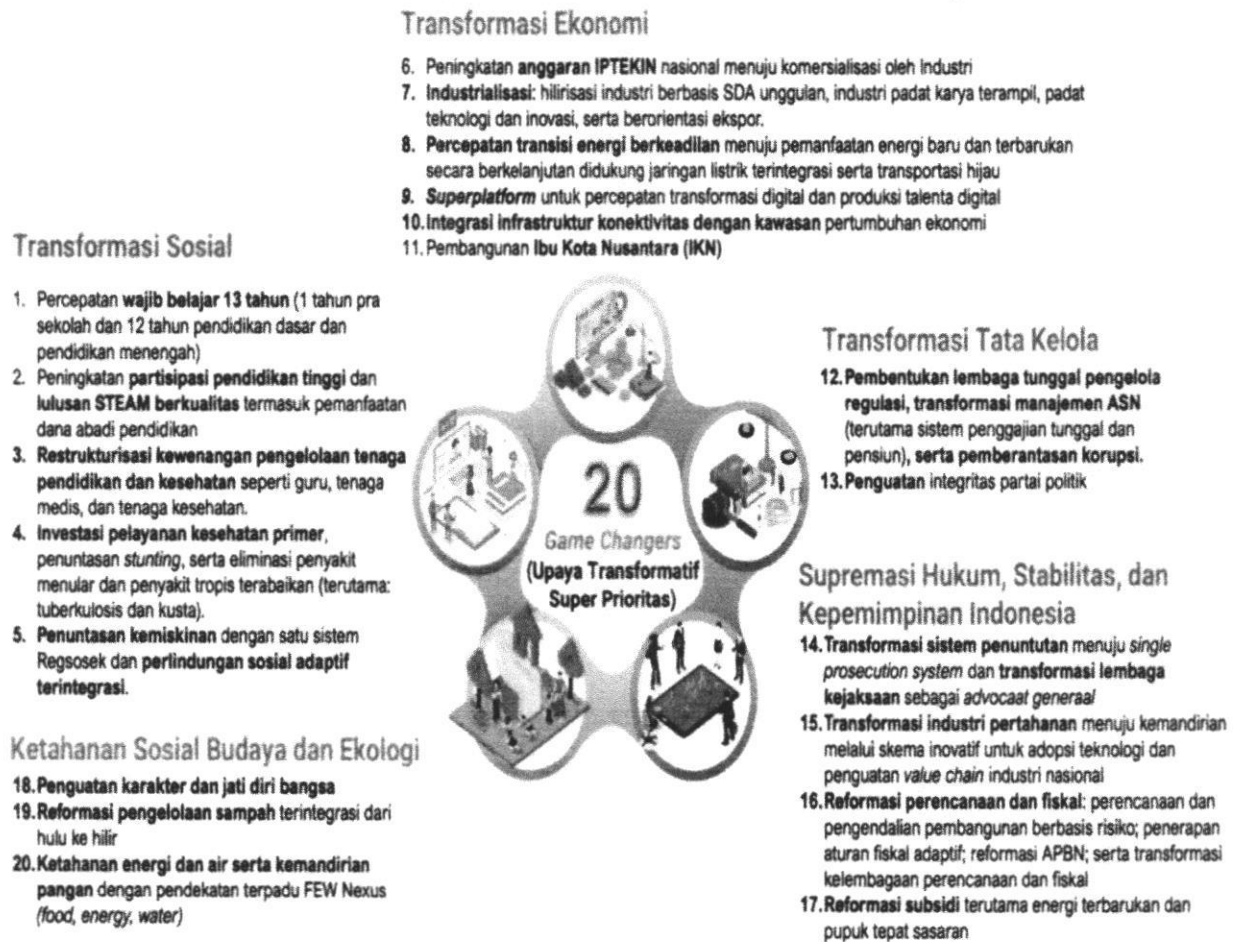
Transformasi	Tahun Pertama 2025 - 2029 Penguatan Fondasi Transformasi	Tahun Kedua 2030 - 2034 Akselerasi Transformasi	Tahun Ketiga 2035 - 2039 Mulai melakukan ekspansi global	Tahun Keempat 2040 - 2045 Indonesia Emas 2045
Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Perwujudan manusia Indonesia yang unggul
Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif serta perluasan sumber	Penguatan transformasi yang menghasilkan economic powerhouse	Perwujudan negara berpendapatan tinggi

Transformasi	Tahun Pertama 2025 - 2029 Penguatan Fondasi Transformasi	Tahun Kedua 2030 - 2034 Akselerasi Transformasi	Tahun Ketiga 2035 - 2039 Mulai melakukan ekspansi global	Tahun Keempat 2040 - 2045 Indonesia Emas 2045
		pertumbuhan ekonomi	dengan jaringan rantai nilai global dan domestik yang kokoh	
Transformasi Tata Kelola	Perbaiki kelembagaan tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti dan penerapan manajemen Resiko, pelayanan publik berbasis TI, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil	Terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, simplifikasi regulasi berbasis TI, partai politik yang berintegritas, dan masyarakat sipil yang partisipatif	Terwujudnya kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, lembaga tunggal regulasi, serta masyarakat sipil mandiri	Tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

4.1.2.2 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

Gambar 4. 7 Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer)



Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

RPJPN sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), yaitu:

Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia

Transformasi Sosial

2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
3. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
4. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.

5. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
6. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

Transformasi Ekonomi

6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri.
7. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
9. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Transformasi Tata Kelola

12. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
13. Penguatan integritas partai politik.

Tujuh (7) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game changers) untuk Landasan Transformasi

Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

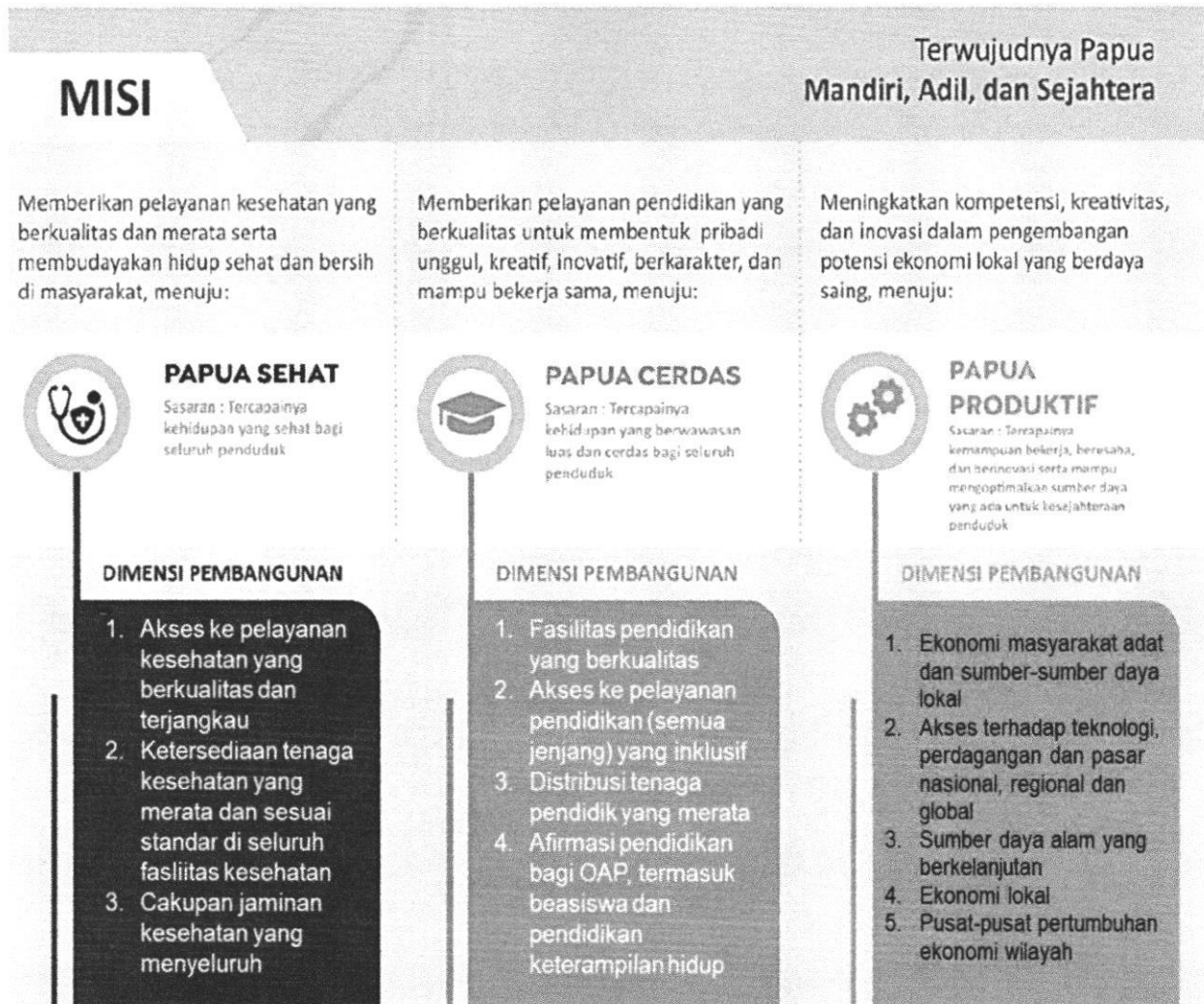
14. Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single prosecution System dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advokat Jenderal.
15. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.

16. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis Resiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
17. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekoologi
18. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
19. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
20. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW nexus (food, energy, water)

4.2. RIPPP 2022-2041

Disahkannya UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomii Khusus bagi Provinsi Papua berimplikasi pada dirumuskannya langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun mendatang. Langkah-langkah strategis tersebut termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, serta peraturan turunannya yaitu Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomii Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk tahun 2022-2041. Adapun RAPPP merupakan rencana aksi nasional 5 (lima) tahunan yang memuat sinergi program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan pada pemerintah pusat dan daerah.

Gambar 4. 8 Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua



Sumber: RIPPPTahun 2022-2041

Percepatan pembangunan Papua Tengah ke depan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mendukung hal tersebut, terdapat visi percepatan pembangunan Papua 2022-2041 yaitu “*Terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera*”. Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi tersebut terdapat misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:

1. Misi-1, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.

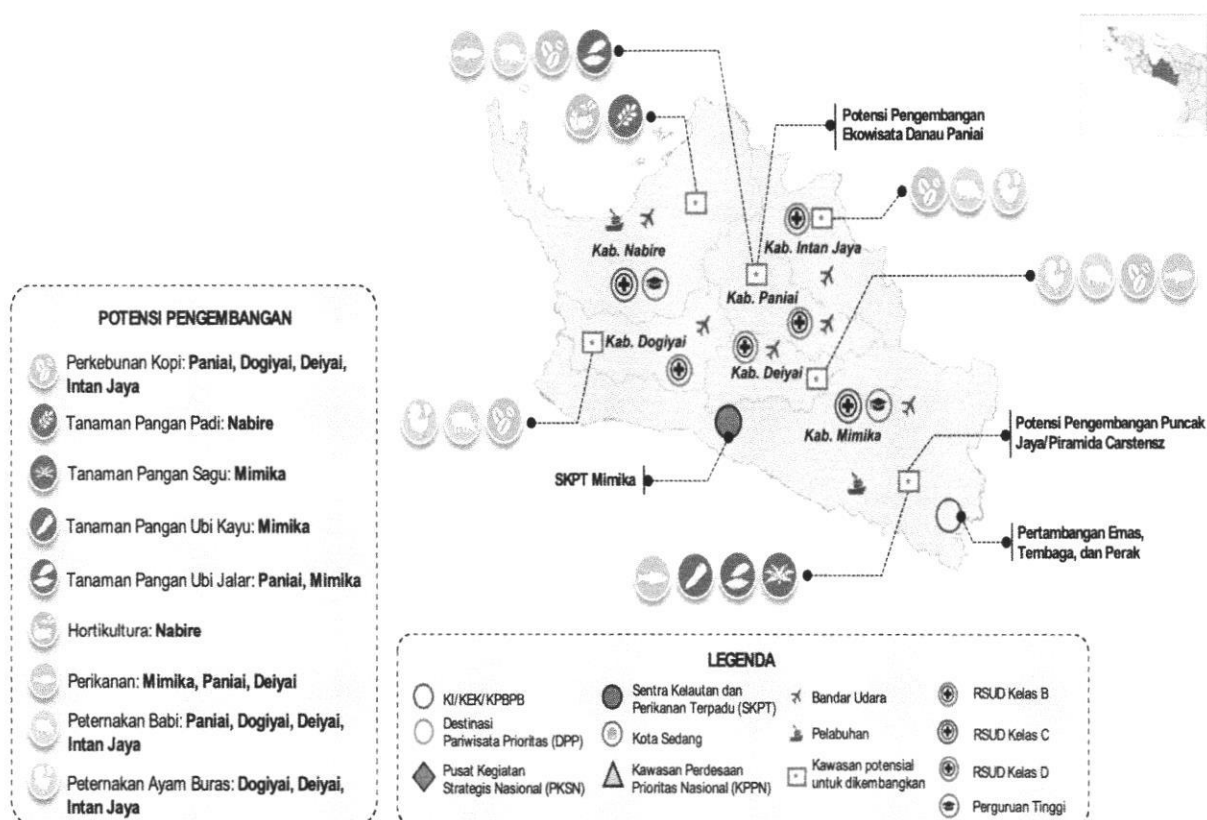
2. Misi-2, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3. Misi-3, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, seluruh wilayah adat di Papua menghadapi permasalahan terkait rendahnya kualitas SDM, kemiskinan, konektivitas, serta infrastruktur dan pelayanan dasar. Untuk itu, dalam percepatan pembangunan Papua diperlukan afirmasi untuk 7 (tujuh) wilayah adat.

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Mee Pago (Provinsi Papua Tengah) yaitu:

“Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Mee Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta hilirisasi hasil pertambangan.”

Gambar 4. 9 Peta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha (Provinsi Papua Tengah)



Sumber: RIPPP Tahun 2022-2041

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
2. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
3. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skfll deuelopment centel);
4. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
5. Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
6. Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belania kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;

8. Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
9. Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (a) Mengembangkan sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
 - (b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
 - (c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
 - (d) Mengembangkan pusat industri hasil pertambangan mineral.

4.3. Visi dan Misi Papua Tengah

Visi dan misi merupakan sarana paling sederhana tentang bagaimana gambaran masa depan suatu daerah dapat dikomunikasikan dan disepakati. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah adalah kesepakatan seluruh stakeholders tentang apa dan bagaimana wujud Provinsi Papua Tengah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan serta kerangka umum bagaimana mencapainya. Melalui visi dan misi daerah ini dapat dilihat wujud Provinsi Papua Tengah pada akhir tahun 2045 sebagaimana diinginkan bersama masyarakat dalam wujud yang nyata.

Visi dan misi pembangunan dirumuskan berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis Provinsi Papua Tengah saat ini dan sasaran serta arah pembangunan yang diharapkan. Kemudian upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Dalam perumusan visi Provinsi Papua Tengah ini juga memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan.

4.3.1. Visi

*"Terwujudnya Papua Tengah
Adil, Berdaya Saing,
Maju Dan Berkelanjutan"*

Sebagai dasar pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap terdepan dalam mempertahankan alam & budaya sebagai aset bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua Tengah.

ADIL

Keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek pembangunan, termasuk distribusi sumber daya, akses terhadap layanan, dan peluang bagi semua lapisan masyarakat dan dapat mengacu pada peningkatan akses dan keadilan dalam sistem hukum dan sosial.

BERDAYA SAING

Menunjukkan fokus pada peningkatan daya saing wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang baik, serta sumber daya manusia yang terampil dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing Papua Tengah.

MAJU

Bila dilihat dari tujuan nasional, pada tahun 2045 Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Hal ini juga secara langsung akan beriringan dengan tujuan dari Provinsi Papua Tengah menjadi provinsi berdaya, inovatif dan tangguh. Kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat baik dari segi ekonomi, social, politik maupun keamanan.

BERKELANJUTAN

Mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan asas konservasi baik dalam hal SDA, lingkungan alam, lingkungan hidup, serta keanekaragaman budaya dengan prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan tidak serta merta mengeksploitasi kekayaan alam dan berorientasi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi mengedepankan

peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan menjunjung kearifan lokal.

4.3.2. Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Misi juga menjadi alasan mengapa suatu entitas organisasi lahir dan dibutuhkan serta dengan komitmen apa untuk jangka panjang dibuat kepada stakeholders. Dengan demikian, misi pembangunan jangka panjang adalah komitmen untuk menyelenggarakan serangkaian pembangunan yang memenuhi perspektif pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Papua Tengah guna menjamin tercapainya visi pembangunan jangka panjang daerah. Untuk mewujudkan Visi Provinsi Papua Tengah tersebut di atas dan untuk memberikan arah dan fokus program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan Misi Provinsi Papua Tengah, yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di Papua Tengah untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Misi untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah, serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing.

3. Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Misi untuk meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi, dan pelayanan Publik khususnya pada wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

4. Memantapkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta stabilitas daerah

Misi untuk Meningkatkan dan Melindungi kehidupan sosial masyarakat serta menjamin keamanan dan ketertiban umum khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.

5. Memantapkan Ketahanan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan

Misi untuk melindungi kehidupan sosial Budaya dengan lingkungan alam Papua Tengah serta mendorong praktek-praktek berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam

6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang adil dan merata dengan Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah

Misi untuk meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta aksesibilitas Masyarakat dalam Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Terutama Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar

Misi untuk Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis Kearifan Lokal dan Kampung Adat serta melaksanakan Mitigasi bencana.

8. Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan daerah

Misi ini dimkasudkan unutk melakukan pembangunan daerah berkesinambungan, yang berkelanjutan dengan melihat Kebutuhan Daerah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Tujuan perencanaan pembangunan adalah memberikan arah kegiatan pembangunan yang diprogramkan untuk dilaksanakan berdasarkan kajian mendalam atas biaya dan manfaat yang menjadi konsekuensi apabila suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan. Biaya yang ditimbulkan adalah biaya sosial secara total dalam arti biaya ekonomi maupun biaya non ekonomi yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat. Demikian pula dengan manfaat yang diterima atau diharapkan merupakan manfaat sosial yaitu manfaat ekonomi dan non ekonomi yang akan diterima oleh seluruh masyarakat.

Rekomendasi Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda atau tema yang merupakan fokus pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan jangka panjang daerah dibuat di setiap tahapan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan.

5.1. Arah Kebijakan Jangka Panjang

5.1.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah 2025-2045 dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu tahap I, II, III dan IV. Arah kebijakan pembangunan disusun dalam tahapan pembangunan dan prioritas setiap tahapan. Prioritas ini mencerminkan urgensi permasalahan pembangunan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus atau tema pembangunan dalam setiap tahapan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah. Tema tersebut untuk memudahkan pemahaman bahwa satu tahapan ke tahapan berikutnya saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh selama masa 20 tahun. Arah kebijakan pembangunan disusun untuk sektor-sektor paling prioritas yang harus diperhatikan dan saling terkait dalam periode 20 (dua puluh) tahun.

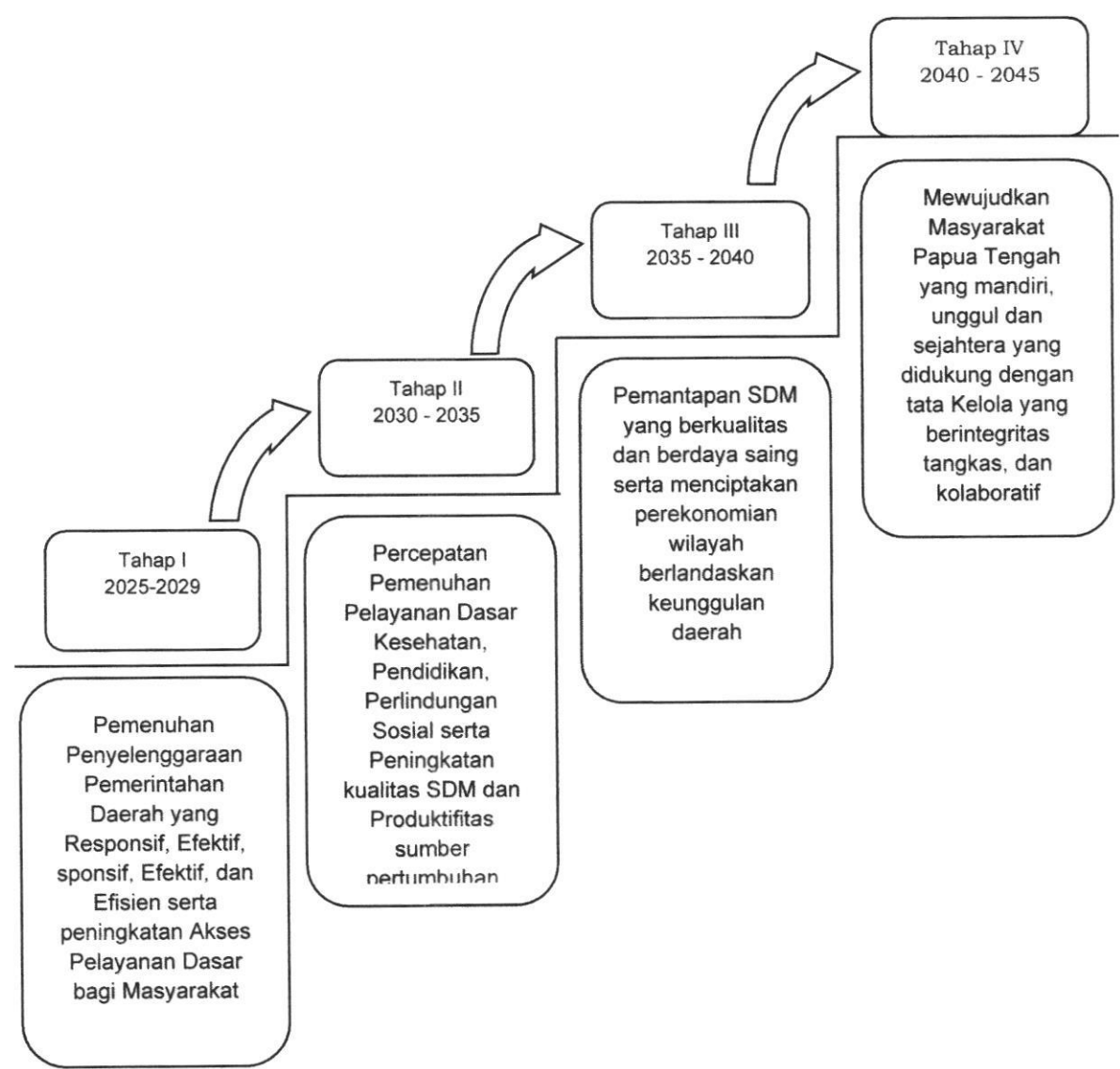
Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas sehingga RPJPD memiliki keselarasan dengan pentahapan dalam RPJPN. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RPJMD. Tema pembangunan yang

diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan lima tahunan (dan sasaran pokoknya) ini yang menjadi acuan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam merumuskan visi dan misi. Dengan demikian, siapapun kepala pemerintahan Provinsi Papua Tengah, kebijakan pembangunan selama periode kepemimpinannya akan tetap mengarah pada visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah dituangkan dalam RPJPD ini. Sasaran pokok pembangunan harus dituangkan dalam dokumen RPJMD periode terkait.

Agenda atau tema pembangunan tiap periode pembangunan di Provinsi Papua Tengah selama 20 tahun kedepan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

*Papua Tengah Yang
Adil, Berdaya Saing, Maju & Berkelanjutan*

Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah



Sumber: Hasil Analisa, 2023

5.1.2 Arah Kebijakan Papua Tengah 2025-2045

Sebagai gambaran besar pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah, berikut disajikan tabel mengenai misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan, serta tahapannya dalam empat periode pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Tengah.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Provinsi Papua Tengah 2025-2045

No	Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2045			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Terwujudnya Papua Tengah Adil, Berdaya Saing, Maju & Berkelanjutan</i>	Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan telemedicine dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan telemedicine dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan telemedicine dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan telemedicine dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan

			disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok	dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok	disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok	dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok
--	--	--	---	--	---	--

			agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.	wilayah sulit akses.	agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.	wilayah sulit akses.
			Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan

			insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.	insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.	insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.	insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.
			Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan	Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan	Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan	Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan

			berbasis pangan lokal.	berbasis pangan lokal.	berbasis pangan lokal.	berbasis pangan lokal.
			Percepatan eliminasi malaria.	Percepatan eliminasi malaria.	Percepatan eliminasi malaria.	Percepatan eliminasi malaria.
			Peningkatan pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS	Peningkatan pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS	Peningkatan pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS	Peningkatan pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS
			Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui

			melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan guru, serta penguatan sekolah terbuka dan Berpola Asrama	pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan guru, serta penguatan sekolah terbuka dan Berpola Asrama	melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan guru, serta penguatan sekolah terbuka dan Berpola Asrama	pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan guru, serta penguatan sekolah terbuka dan Berpola Asrama
			Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
			Percepatan peningkatan	Percepatan peningkatan	Percepatan peningkatan	Percepatan peningkatan

			partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.	partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.	partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.	partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
			Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan

			kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.
			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan,	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan,	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan,	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perikanan, pertambangan,

			perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.
			Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).
			Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi

			melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin	melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan	melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin	melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan
--	--	--	--	--	--	--

			dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
			Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

			Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
			Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan

			ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
			Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi Resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi Resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi Resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi Resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan

			cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta	cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta	cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta perubahan iklim.
--	--	--	---	--	---	--

			program terkait perubahan iklim.		program terkait perubahan iklim.	
			Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat -	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat -	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat -

			penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
			Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif,	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif,	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.

			terutama untuk daerah 3T.		terutama untuk daerah 3T.	
			Percepatan penanganan penyelenggaraan Pendidikan di kawasan rawan konflik.	Percepatan penanganan penyelenggaraan Pendidikan di kawasan rawan konflik.	Percepatan penanganan penyelenggaraan Pendidikan di kawasan rawan konflik.	Percepatan penanganan penyelenggaraan Pendidikan di kawasan rawan konflik.
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan perikanan	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan Peternakan), perkebunan, Kelautan dan perikanan

			perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis mineral melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis pariwisata dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan	termasuk hilirisasi industri berbasis mineral melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis pariwisata dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan	perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis mineral melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis pariwisata dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan	termasuk hilirisasi industri berbasis mineral melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis pariwisata dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan
--	--	--	---	---	---	---

			pasar di kawasan perkotaan.		pasar di kawasan perkotaan.	
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
			Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan

			proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	kelembagaan, serta adopsi teknologi.	proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	kelembagaan, serta adopsi teknologi.
			Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.

			kemitraan usaha.		kemitraan usaha.	
			Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi.
			Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama

			sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.
			Pelaksanaan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan	Pelaksanaan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan pusat-pusat	Pelaksanaan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan	Pelaksanaan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pengembangan pusat-pusat

			pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	keahlian ketenagakerjaan.	pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	keahlian ketenagakerjaan.
			Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih dengan melibatkan masyarakat lokal.	Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih dengan melibatkan masyarakat lokal.	Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih dengan melibatkan masyarakat lokal.	Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dan Teluk Cendrawasih dengan melibatkan masyarakat lokal.
			Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan

			kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.	kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.	kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.	kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.
			Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis minat khusus dengan	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis minat khusus dengan	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis minat khusus dengan	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis minat khusus dengan

			target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus, serta pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif.	target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus, serta pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif.	target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus, serta pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif.	target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus, serta pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif.
--	--	--	--	--	--	--

			Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.
			Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.
			Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii)	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii)	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii)	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii)

			pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui co-firing dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan	pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui co-firing dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk	pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui co-firing dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan	pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui co-firing dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan
--	--	--	--	--	--	--

			sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan	meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated	sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan	meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated
--	--	--	--	---	--	---

			sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi;	mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM	sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi;	mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM
--	--	--	---	--	---	--

			(viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	(viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
			Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital

			yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK	yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor	yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK	yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor
--	--	--	--	---	--	---

			di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya	prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi	di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya	prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi
--	--	--	--	--	--	--

			meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
			Peningkatan kualitas dan penguatan	Peningkatan kualitas dan penguatan	Peningkatan kualitas dan penguatan	Peningkatan kualitas dan penguatan

			Legalitas kelembagaan Badan Usaha Koperasi dan lainnya yang dikelola OAP	Legalitas kelembagaan Badan Usaha Koperasi dan lainnya yang dikelola OAP	Legalitas kelembagaan Badan Usaha Koperasi dan lainnya yang dikelola OAP	Legalitas kelembagaan Badan Usaha Koperasi dan lainnya yang dikelola OAP
			Penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMD dan BUMN dalam pengelolaan komoditas unggulan lokal	Penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMD dan BUMN dalam pengelolaan komoditas unggulan lokal	Penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMD dan BUMN dalam pengelolaan komoditas unggulan lokal	Penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMD dan BUMN dalam pengelolaan komoditas unggulan lokal
			Pengembangan Daerah Menuju Perkotaan Maju	Pengembangan Daerah Menuju Perkotaan Maju	Pengembangan Daerah Menuju Perkotaan Maju	Pengembangan Daerah Menuju Perkotaan Maju
		Mewujudkan Transformasi	Optimasi dan harmonisasi	Optimasi dan harmonisasi	Optimasi dan harmonisasi	Optimasi dan harmonisasi

		tata Kelola dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan,dan Perikanan, pertanian, dan perkebunan.	regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan,dan Perikanan, pertanian, dan perkebunan.	regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan,dan Perikanan, pertanian, dan perkebunan.	regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan,dan Perikanan, pertanian, dan perkebunan.
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan,	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan,	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan

			dan pengawasan pembangunan.	pengawasan pembangunan.	dan pengawasan pembangunan.	pengawasan pembangunan.
			Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
			Pengembangan <i>smart</i>	Pengembangan <i>smart government</i>	Pengembangan <i>smart</i>	Pengembangan <i>smart government</i>

			<i>government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	<i>government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
			Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses

			perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
			Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.
			Pengawasan proses pengembangan karier, promosi	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi

			mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
			Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomii khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomii khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomii khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomii khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
			Penguatan strategi tata kelola otonomii khusus Papua khususnya pengaturan	Penguatan strategi tata kelola otonomii khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan	Penguatan strategi tata kelola otonomii khusus Papua khususnya pengaturan	Penguatan strategi tata kelola otonomii khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan

			kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.
		Memantapkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta stabilitas daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh

			tokoh adat, agama, dan masyarakat, dalam mengoptimalkan serta memperbanyak Ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	adat, agama, dan masyarakat, dalam mengoptimalkan serta memperbanyak Ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	tokoh adat, agama, dan masyarakat, dalam mengoptimalkan serta memperbanyak Ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	adat, agama, dan masyarakat, dalam mengoptimalkan serta memperbanyak Ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
			Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama	Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan	Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama	Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan

			dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).	laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).	dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).	laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia).
			Penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan	Penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan	Penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan	Penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan

			pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana	retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomii khusus, serta sinergi	pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana	retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana serta sinergi
--	--	--	---	---	---	--

			otonomii khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	otonomii khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
			Pemantapan Penguatan kapasitas Kepemimpinan Daerah	Pemantapan Penguatan kapasitas Kepemimpinan Daerah	Pemantapan Penguatan kapasitas Kepemimpinan Daerah	Pemantapan Penguatan kapasitas Kepemimpinan Daerah
			Penurunan konflik Sara	Penurunan konflik Sara	Penurunan konflik Sara	Penurunan konflik Sara
		Memantapkan Ketahanan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran kebudayaan	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran kebudayaan

			kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.
			Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas

			kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
			Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian

			pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.	pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.	pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.	pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.
			Pengurangan Resiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi,	Pengurangan Resiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi,	Pengurangan Resiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi,	Pengurangan Resiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi,

			kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.
			Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.	Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.	Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.	Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.
			Penguatan upaya mempertahanka n ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung	Penguatan upaya mempertahanka n ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies burung

			dan satwa lainnya yang dilindungi.	dan satwa lainnya yang dilindungi.	dan satwa lainnya yang dilindungi.	dan satwa lainnya yang dilindungi.
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta Resiko bencana.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta Resiko bencana.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta Resiko bencana.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta Resiko bencana.

			Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta peningkatan kapasitas	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta kapasitas
--	--	--	---	---	---	---

			peningkatan kapasitas pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap Resiko perubahan iklim.	pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap Resiko perubahan iklim.	peningkatan kapasitas pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap Resiko perubahan iklim.	pemerintah dan <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap Resiko perubahan iklim.
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta Penguatan pengarusutamaan gender dan	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta Penguatan pengarusutamaan gender dan	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta Penguatan pengarusutamaan gender dan	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta Penguatan pengarusutamaan gender dan

			inklusi sosial dalam pembangunan.	inklusi sosial dalam pembangunan.	inklusi sosial dalam pembangunan.	inklusi sosial dalam pembangunan.
			Pemberdayaan, pemenuhan hak, dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas,	Pemberdayaan, pemenuhan hak, dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan	Pemberdayaan, pemenuhan hak, dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas,	Pemberdayaan, pemenuhan hak, dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan

			kemandirian, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	kemandirian, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.
			Pembangunan tampungan air serba guna untuk	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi	Pembangunan tampungan air serba guna untuk	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi

			memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.	kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.	memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.	kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.
			Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.
			Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian

			banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai serta pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai serta pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai serta pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai serta pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.
			Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
			Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
			Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang

			masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.
			Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal (KIK) Papua Tengah harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Hukum Adat dan UUD 1945	Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal (KIK) Papua Tengah harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Hukum Adat dan UUD 1945	Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal (KIK) Papua Tengah harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Hukum Adat dan UUD 1945	Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal (KIK) Papua Tengah harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Hukum Adat dan UUD 1945

		Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang adil dan merata dengan Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonomi Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonomi Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonomi Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonomi Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.
			Penguatan strategi tata kelola otonomii khusus Papua khususnya	Penguatan strategi tata kelola otonomii khusus Papua khususnya pengaturan	Penguatan strategi tata kelola otonomii khusus Papua khususnya	Penguatan strategi tata kelola otonomii khusus Papua khususnya pengaturan

			pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.
			Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.
			Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan

			kesatuan ekologi/ekosistem.	ekologi/ekosistem .	kesatuan ekologi/ekosistem .	ekologi/ekosistem .
			Penuntasan RTRW, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut dan peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	Penuntasan RTRW, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut dan peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	Penuntasan RTRW, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut dan peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	Penuntasan RTRW, RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut dan peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
			Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment hub</i> domestik melalui pengembangan Pelabuhan	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment hub</i> domestik melalui pengembangan Pelabuhan	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment hub</i> domestik melalui pengembangan Pelabuhan	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment hub</i> domestik melalui pengembangan Pelabuhan

			Amamapare (Papua Tengah), pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-	Amamapare (Papua Tengah), pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll- On/Roll-Off)	Amamapare (Papua Tengah), pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-	Amamapare (Papua Tengah), pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll- On/Roll-Off)
--	--	--	--	---	--	---

			On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
			Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Nabire Baru di Nabire), pembangunan dan standardisasi airstrip,	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Nabire Baru di Nabire), pembangunan dan standardisasi airstrip, pengembangan bandara perairan	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Nabire Baru di Nabire), pembangunan dan standardisasi airstrip,	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Nabire Baru di Nabire), pembangunan dan standardisasi airstrip, pengembangan bandara perairan

			pengembangan bandara perairan (<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	(<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	pengembangan bandara perairan (<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	(<i>waterbase</i>) dan <i>seaplane</i> sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
--	--	--	---	---	---	---

		Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Terutama Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
				menjangkau seluruh wilayah.	menjangkau seluruh wilayah.	menjangkau seluruh wilayah.
			Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan

			berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
			Pemenuhan akses air minum	Pemenuhan akses air minum serta	Pemenuhan akses air minum	Pemenuhan akses air minum serta

			serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
		Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan daerah	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
			Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.

			Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.
			Pengembangan pengetahuan dan teknologi	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang	Pengembangan pengetahuan dan teknologi	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang

			yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
			Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
			Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak

			sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
			Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.
			Penanganan permukiman kumuh melalui	Penanganan permukiman kumuh melalui	Penanganan permukiman kumuh melalui	Penanganan permukiman kumuh melalui

			pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
			Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.

			Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
			Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan	Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan	Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan	Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan

			dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah.	karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah.	dengan karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah.	karakteristik budaya dan adat serta kondisi geografis wilayah.
			Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
			Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka

			penegakan standar keandalan bangunan.	penegakan standar keandalan bangunan.	penegakan standar keandalan bangunan.	penegakan standar keandalan bangunan.
			Penyediaan perumahan yang layak di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	Penyediaan perumahan yang layak di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	Penyediaan perumahan yang layak di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	Penyediaan perumahan yang layak di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.
			Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok daerah yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan. Sasaran pokok juga menjadi instrumen pengukuran kinerja berdasarkan tema dan arah kebijakan pembangunan setiap tahapan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang dibagi dalam empat periode pembangunan Provinsi Papua Tengah 2025-2045, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan berdasarkan periode atau tahapan pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam perumusan sasaran pokok memperhatikan Sasaran Visi dan Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan penahapan arah kebijakan. Berikut merupakan sasaran pokok pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok Visi dan indikator Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

Visi	Sasaran Pokok	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Terwujudnya Papua Tengah Adil, Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan	Peningkatan Pendapatan Perkapita	PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	117,62 – 118,65	885,41 – 1.367,13
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	22,64*	40,33*
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	0,27 - 0,36*	2,73 - 3,50*
	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	26,50 – 27,00*	5,65-6,95*
		Rasio Gini (indeks)	0,383	0,341
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,77	0,91
		Pertumbuhan Ekonomi	6,17-6,87	5,22-8,16
	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kepemimpinan Daerah	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Sedang	Tinggi
	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,43*	0,57*
	Penurunan Emisi GRK menuju net zero emission	a. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	59,28	99,45
		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,56*	88,58*

Sumber: SEB 2 Bappenas 2024, (data diolah)**

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok Misi dan indikator Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Papua Tengah Sehat	Papua Tengah Sehat	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	69,2	76,15
			Kesehatan Ibu dan Anak:		
			a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	449*	52*
			b. Prevalensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek) Pada balita (%)	33,1*	5,7*
			Penanganan Tuberkulosis :		
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	83*	95*
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	82,8*	98*
			c. Eliminasi Malaria Per Kabupaten	N/A	100
			d. Jumlah Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk di daerah terinfeksi	3.671	734

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	99,5	99,5
	Terwujudnya Papua Tengah Cerdas	Papua Tengah Cerdas	Hasil Pembelajaran :		
			a. Presentase Kabupaten/Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat nasional untuk :		
			ii) Literasi Membaca	12,50 - 12,50*	62,50 - 75,00*
			ii) Numerasi	0,00 - 12,50*	62,50 - 62,50*
			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			• Literasi Membaca	22,37 - 24,37*	60,74 - 62,74
			ii) Numerasi	14,61 - 16,61*	54,69 - 56,69
			c. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	7,60 - 7,62*	9,52 - 9,67*
			d. Harapan Lama Sekolah	11,41 - 12,19*	12,54 - 16,70*
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,34	9,34 - 11,29

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
	Terwujudnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Papua Tengah	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	77,21*	85,00*
			Tingkat Kemiskinan (%)	26,50 – 27,00*	5,65-6,95*
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	50,32*	95,47*
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	42
Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,27 - 0,36*	2,73 - 3,50*
			Pengembangan Pariwisata		
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,22*	0,31*
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	4,45*	8,90*
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	0,5
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	18,32*	19,86*

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
			b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,63*	3,43*
			c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,58	1,23
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,17*	1,23
			e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,95	4,28
			Penciptaan Lapangan Kerja yang baik		
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,75-2,10*	1,40 – 2,09*
			b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	20,00*	50,00*
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	65,04*	89,5
			Tingkat Penguasaan IPtek	N/A	60
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah	Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
			c) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	77,87	89,61

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
			a) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,6	56,18
	Terwujudnya transformasi Digital Papua Tengah	Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3,2	7
			a. Rasio Elektrifikasi RT (%)	47,36	60,0
	Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di Papua Tengah	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Perkotaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	3	1
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,88*	31,78*
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	N/A	N/A
	Terwujudnya Perkotaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di Papua Tengah	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
			a) Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Provinsi Terhadap Nasional	0,73	1,00
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	30,94	100
			c) Presentase Desa mandiri	0,00*	0,17*
			d) Presentase Mantap Jalan	53,19	60,0

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif di Papua Tengah	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	70*	100*
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,00*	5,00*
			Indeks Pelayanan Publik	1,11*	5,00*
			Indeks Integritas Nasional	62.98	75.87
Memantapkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta Stabilitas daerah	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamananan DaerahTangguh, dan Demokrasi Substansi pada Provinsi Papua Tengah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Daerah	Usulan Proksi :		
			a) Presentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	70*	100*
			b) Presentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60*	80*
			Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya (%)	N/A	80
			Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah	Stabilitas Ekonomi Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,39*	0,80*
			Tingkat Inflasi (%)	4,2-5,4*	1,4-4,4*
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	17,35	48,3

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,29	4,27
			c) Nilai Transaksi saham per Provinsi Berupa Nilai rata-Rata Tahunan	856.520,71	3.499.519,36
			d) Total Kredit/PDRB (%)	13,02	42,30
			Inklusi Keuangan (%)	86,79	98,96
	Terwujudnya Ketangguhan Kepemimpinan Daerah Papua Tengah	Ketangguhan Kepemimpinan Daerah	Indeks Kepemimpinan Daerah	Sedang	Tinggi
			Presentase Penurunan Konflik Sara	N/A	70
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Terwujudnya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	49,54-49,61*	57,41-58*
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,46-76-76,57*	83,87-85*
	Terwujudnya Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39,38-39-51*	43,43-44,36*
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,493-0,492*	0,245-0,231*

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
	Masyarakat Inklusif				
	Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,389	0,624
			Kualitas Lingkungan Hidup		
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,56*	88,58*
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1,19*	50,00
			c) Pengelolaan Sampah		
			- Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	6,00	85,00
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	27,00	100
	Terwujudnya berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:		
			a) Ketahanan Energi		
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	315*	1.190
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	90	60

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Sasaran 2045
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	34,04*	5,43*
			c) Ketahanan Air		
			- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	0	2,66
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20*	100
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (IRB)	191,94*	163,46-139,02*
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			Kumulatif	23.19	57,86
			Tahunan	39.01	91,355

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 Provinsi Papua Tengah ini merupakan dokumen yang berisikan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok daerah. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan didalam penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Papua Tengah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Dokumen RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam Menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 yaitu “TERWUJUDNYA PAPUATENGAH ADIL, BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN”, maka perlu harus didukung oleh: 1) Komitmen dari Kepemimpinan Pemerintah Provinsi yang kuat dan demokratis; 2) Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi; 3) Keberpihakan kepada masyarakat terutama penduduk asli Papua; 4) Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan; 5) Komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tengah dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk mewujudkan visi Papua Tengah yaitu “TERWUJUDNYA PAPUA TENGAH ADIL, BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN”, pada tahun 2045, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan tertinggi di daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun), sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya.
2. Penjabaran dari dokumen RPJPD kedalam dokumen perencanaan lainnya harus dilakukan secara konsisten dan berkualitas, untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pelaku non pemerintah.

3. Supaya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dapat konsisten menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator kinerja RPJMD maka diperlukan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
4. Dalam proses penjabaran RPJPD ke dalam dokumen perencanaan turunannya, menggunakan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dengan menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Melalui KKL tersebut maka sasaran pokok berupa impact yang terdapat pada RPJPD dapat diterjemahkan dengan baik sampai dengan level output.
5. Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pokok, maka dilakukan pengendalian secara kontinu dan partisipatif dari para pemangku kepentingan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen resiko, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
6. Sejalan dengan perkembangan tantangan yang sangat dinamis dan perubahan tatanan sosial yang sangat cepat, memungkinkan adanya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD ini menjadi kurang adaptif atau tidak dapat diwujudkan. Dalam kondisi demikian maka dokumen RPJPD ini dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Manajemen Resiko Pembangunan

Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode dan menjaga sinkronisasi kerangka logis dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan diberbagai bidang dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini memerlukan penyelenggaraan manajemen resiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kapasitas hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen resiko.

Dalam melakukan manajemen resiko, bukan hanya identifikasi Resiko dan penilaian resiko, setelah itu dilakukan mitigasi resiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap resiko yang telah diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi Impact dan probability untuk mencegah agar resiko tidak terjadi atau dihindari. Dalam melakukan mitigasi resiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan

yang terdiri dari 4(empat) macam, yaitu menerima resiko, transfer resiko, mengurangi resiko, dan menghindari resiko.

Manajemen resiko di Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

6.3 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pengendalian Perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain program, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik di pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian Pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup; (i) pemantauan pelaksanaan program pembangunan; (ii) Pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran pokok; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

6.4 Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka mendorong perluasan pembiayaan Pembangunan daerah, maka peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

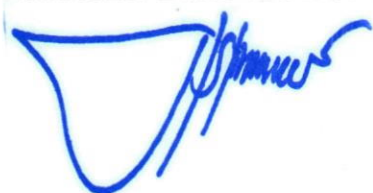
(i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);

(ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya;

(iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002